

**Ulama dan Politik: Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi
pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
guna memperoleh gelar sarjana Program Sarjana (S-1)



Oleh:

Lailiya Tuzuhriyah
(1706016019)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

Nota Pembimbing:

ULAMA DAN POLITIK:

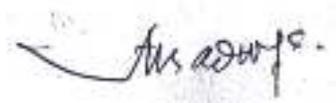
**ANALISIS PERAN POLITIK ULAMA PESANTREN BERBASIS NU ERA REFORMASI
PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN PURWOREJO**

Oleh: Lailiya Tuhzuhriya

NIM (1706016019)

Disetujui dan Disahkan oleh:

Pembimbing



T. Adib, S. Ag. M. S.

NIP:197303202002121002

Mengetahui

Ketua Program Studi S-1 Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

LEMBAR PENGESAHAN

Ulama dan Politik: Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo

Disusun oleh

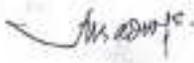
Lailiya Tuzuhriyah

1706016019

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 29 April 2021 dan telah dinyatakan lulus.

Ketua

Dr. Aftivan Fanani, M.Ag

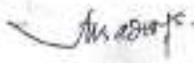
Sekretaris

H. Adib, S.Ag., M.Si

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

Penguji II

Masrohatus, M.Si

Pembimbing I

H. Adib, S.Ag., M.Si

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Lailiya Tuzuhriyah
Nim : 1706016019
Program Study : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Ulama & Politik: Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo ”** ialah benar-benar karya sendiri, bukan hasil dari menjiplak dari karya orang lain kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber di dalamnya. Apabila skripsi saya terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan saya siap menerima sanksi yang diberlakukan.

Semarang, 23 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Lailiya Tuzuhriyah

NIM: 1706016019

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wb.Wb

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan juga rahmatNya penulisan skripsi dengan judul “Ulama & Politik: Analisis Peran Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan juga salam selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang sehingga dapat mengantarkan umatnya dari jaman kegelapan menuju kehidupan yang lebih terang penderang serta mengenal Tuhannya seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi tugas serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Sangat disadari dalam penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya dan kesehatan bagi penulis.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq,M.Ag.
3. Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.
4. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Bapak H. Adib,S.Ag.,M.Si.
5. Bapak H. Adib,S.Ag.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali memberikan arahan serta motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak
7. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang selama ini telah dengan sabar memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Program nStudi Sarjana Ilmu Politik.
8. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.
9. Bapak KHRS. Hasan Agil Ba'bud, Bapak KH. Hamid, Bapak KH. Farid, Bapak K. Yusuf Sholih, Bapak Umar, Saudara faisal, dan Saudari Fita yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini.
10. Keluarga tercinta ayah dan ibu yang selalu memberikan support, memotivasi, dan selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kaka tercinta abang Faris Nur S. dan kaka Wijayanti Ockta yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman ilmu politik angkatan 2017, khususnya teman-teman ilmu politik kelas B yang selama ini selalu menemani belajar di kampus.

13. Teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, khususnya Radha Aliya A., Siti Nur ishma, Sazkia Afiatul I., Farisa N., Itsna Tifani, dan juga Hanum sahabat-sahabat penulis yang selalu mengingatkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
14. Terimakasih untuk Istiq Nafi (teman persambatan skripsi) yang dari awal tahu betul perjalanan penulis hingga selesai.
15. Terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat berhasil mendapat gelar sarjana.

Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman semua. penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan dalam diri penulis, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan, harapan penulis juga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 23 April 2021



Lailiya Tuzuhriyah

Persembahan

Teruntuk bapak dan ibuku, karya sederhana ini saya persembahkan. Dan untuk:

Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

Motto

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ

Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat (pertolongan) bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.

Abstrak

Ulama dan Politik: Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo

Ulama memiliki posisi strategis dan penting dalam struktur sosial masyarakat. Bahkan Bangsa Indonesia pun dalam mencapai kemerdekaannya tidak luput dari peran ulama. Ulama hadir sebagai pondasi penguat bangsa, eksistensi ulama memang sudah ada sejak awal. Di Kabupaten Purworejo sendiri ulama juga menjadi figur tokoh dalam kehidupan masyarakat bahkan tak jarang menjadi penengah penyelesaian beberapa masalah sosial.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana keterlibatan/peran ulama NU dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian kepada salah satu ulama Purworejo yaitu KHRS. Hasan Agil yang merupakan Mustasyar PCNU Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama KHRS. Hasan Agil dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memang memberikan sebuah dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam hal ini pasangan calon No. 2 Kuswanto-Kusnomo. Sebagai bentuk KHRS. Hasan Agil memberikan dukungan ialah (1) secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap pasangan calon (2) kampanye (3) hadir dalam beberapa kegiatan pasangan calon (4) mengajak para banom untuk memberikan dukungan. Hubungan antara KHRS. Hasan Agil dengan para pasangan calon lainnya terbilang cukup baik. Ulama memang menjadi ikon penting dalam sebuah kontestasi politik, sebab dirasa ulama mampu menjadi magnet untuk menarik masa agar simpati terhadap pasangan calon, karenanya mendapatkan dukungan serta restu secara langsung dari ulama menjadi lampu hijau bagi para politisi. Pada Pilkada 2020 ini, penulis memberikan simpulan atas fenomena yang terjadi bahwa KHRS. Hasan Agil Ba'bud yang secara terbuka memberikan dukungan politik terhadap salah satu peserta Pilkada, Namun yang terjadi ulama masih dijadikan sebagai simbol kekuatan bagi para politisi untuk mendapatkan simpati dan suara masyarakat.

Kata Kunci: *Ulama, NU, dan Pilkada*

Daftar Isi

Nota Pembimbing:	i
Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iv
Persembahan	vi
Motto	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Definisi Operasional	11
3. Sumber dan Jenis Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	16
Ulama, Konsep Peran & Karismatik Leader	16
A. Pengertian Ulama	16
B. Kepemimpinan Karismatik	19
C. Teori Peran	19
BAB III	23
Gambaran Umum Kabupaten Purworejo & Objek Studi	23

A. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo	23
1. Sejarah Kabupaten Purworejo	23
2. Letak Geografis Kabupaten Purworejo	23
3. Potensi Ekonomi Kabupaten Purworejo	26
B. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020	26
1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020	26
2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo	27
3. Hasil Perhitungan Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo	28
C. Ulama & Pesantren di Kabupaten Purworejo	30
1. Pesantren di Kabupaten Purworejo	30
2. Profil Pondok Pesantren Al-Imam Bulus	31
3. Profil KHRS. Hasan Agil Ba'bud	33
BAB IV	34
Analisis Peran Ulama Dalam Politik Elektoral/Pilkada 2020	34
Di Kabupaten Purworejo	34
A. Ulama (NU) dalam Politik Electoral/ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo	35
B. Sikap Ulama (NU) Terhadap Politik Elektoral/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Di Kabupaten Purworejo	39
C. Peran KHRS. Hasan Agil Ba'abud dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo.	42
BAB V	52
Relasi Ulama Dengan Penguasa Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo	52
A. Relasi Ulama dan Politik	52
B. Relasi KHRS. Hasan Agil Ba'bud dengan Penguasa	56
BAB VI	63
PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran:	69

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Purworejo
Tabel 1.2	Presentase Hasil Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo
Tabel 1.3	Hitungan Per Kecamatan Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo

Daftar Gambar

- Gambar 1.1 Wilayah Kabupaten Purworejo
- Gambar 1.2 Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati
- Gambar 1.3 Poster Ulama dengan Pasangan Calon
- Gambar 1.4 Ulama Hadir dalam Acara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulama memiliki status penting dan posisi strategis dalam Islam serta struktur sosial masyarakat pada umumnya. Kata ulama sendiri secara sederhana ialah orang yang mengetahui dan orang yang memiliki ilmu (Burhanuddin, 2002, p. 17). Ulama dalam pandangan Badruddin Subky yaitu sekelompok orang yang menguasai kajian ilmu agama Islam, mampu membimbing umat berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, mengembangkan ajaran agama Islam secara totalitas serta mampu memberikan suri tauladan yang agung bagi masyarakat (Subky, 1995, p. 153). Seperti pengertian sederhana terkait dengan ulama yang merupakan orang memiliki ilmu agama tinggi. Namun, pada praktiknya ulama tidak hanya mengajarkan perihal agama, dalam kehidupan bermasyarakat pun ulama memiliki peran yang cukup signifikan. Selain sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran ilmu agama, ulama juga sebagai penggerak serta menjadi motivator dalam kemajuan umat.

Kajian terkait ulama dan politik adalah kajian yang menarik dan telah menjadi objek kajian dalam kalangan intelektual. Bahkan tak sedikit yang justru menjadi berkembang dalam berbagai ilmu pengetahuan baik agama, ilmu pemerintahan, sosiologi, dan juga ilmu politik. Hal ini terjadi karena pada dasarnya ulama tidak dapat dipisahkan dari dunia politik, figur ulama sangat penting didalamnya terlebih mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, karenanya ulama memiliki pengaruh yang cukup besar.

Dalam Islam sendiri tidak ada pembatasan antara agama dan politik, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Politik yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyangkut strategi kekuasaan dan juga cara penggunaan kekuasaan yang didalamnya tidak akan lepas dari proses untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, akan berdampingan dengan agama yang hadir sebagai pondasi atau pun mengontrol proses didalamnya.

Pada awalnya ulama yang identik dengan ranah keagamaan saja, saat ini sudah mulai merambah pada sosial politik di masyarakat. Sedikit besarnya peran ulama dalam sosial politik sangat berpengaruh, hal ini karena selain ilmu yang dimilikinya ulama juga memiliki karisma yang agung di masyarakat. Bukan hal yang aneh ketika ulama menjadi

obat keresahan bagi masyarakat, dan tidak jarang pula mereka meminta solusi atas perkara yang terjadi, disinilah figur ulama sangat penting ditengah masyarakat. Karismatik ulama tidak dapat diciptakan atau direkayasa untuk melekat pada diri seseorang, namun secara alami kekarismatikan itu ada dalam diri seseorang. Ulama dengan karismatiknya serta berbagai peran yang ditanggungnya baik dalam keagamaan maupun sosial ini menjadikan ulama hadir dengan memiliki kekuasaan hirarkis atas masyarakat. Melihat dari sudut pandang politik, ulama memiliki sumber daya politik yang cukup besar berbasis karismatik dan kekhasannya yang memungkinkan membentuk sikap politis dalam struktur masyarakat disekitarnya. Dengan potensi demikianlah tak jarang para politisi merangkul ulama sebagai jalan agar mendapatkan sebuah kemenangan.

Keterikatan antara ulama dan politik adalah sesuatu yang wajar, bahkan justru memberikan warna tersendiri dalam dunia politik. Seperti yang telah dibahas diatas bahwa tidak ada pembatas antara agama dan juga politik. Fungsi agama dalam pandangan Islam tidak hanya pada lingkup individu agamanya, tetapi lebih dari itu yaitu membentuk sistem sosial, kebudayaan, politik, dan ekonomi masyarakat dan negara. Peranan ulama ataupun tokoh agama bukan hanya sebagai ahli rohani saja, fungsinya secara aktif berperan penting untuk proses pembangunan bangsa. Sebuah negara tidak hanya bergantung pada satu kekuatan untuk menggerakkan pembangunan, aspek lain yang diperlukan negara ialah elemen nilai dan budaya salah satu peran ulama yaitu menyumbang dalam penerapan nilai dan budaya, serta mengajarkan nilai keagamaan yang luhur (Bolong, 2018, p. 138). Sehingga hal-hal tersebut dapat saling beriringan dan berkesinambungan.

Era modern seperti sekarang ini peran ulama menjadi lebih luas, dalam bidang sosial politik sekalipun. Tindakan ataupun kegiatan nyata untuk memperbaiki sosial politik di masyarakat, bukan hanya sekedar ceramah atau pidato. Walaupun tidak secara langsung terjun menjadi politisi, ulama memiliki peran yang cukup kuat, menjadi orang yang dekat dengan penguasa dengan begitu ulama dapat mengontrol orientasi kepemimpinan penguasa begitu juga dengan kebijakannya.

Pada era reformasi yang merupakan awal dari terbentuknya tatanan kehidupan yang baru. Dalam bidang politik misalnya, dimana sistem demokrasi mulai diterapkan dengan baik. Indonesia memasuki babak baru memberikan jalan terhadap nilai kebebasan, bebas dalam menerapkan demokrasi substansial manifestasikan dengan hadirnya partai politik dan adanya hak untuk memilih dan dipilih dalam pesta rakyat. Seperti dewasa ini, politik di Indonesia mulai mengikut sertakan sosok ulama dalam implementasinya. Para ulama yang telah mendapat legitimasi dari masyarakat dianggap dapat memengaruhi dan

mengajak masyarakat untuk mencapai kekuasaan. Ulama menjadi magnet yang luar biasa untuk mendapatkan suara masa, tentunya ini menjadi sasaran empuk bagi para politisi untuk mencapai kemenangannya, menjadikan ulama sebagai pendukung atau bisa saja tim suksesnya¹.

Dalam penelitian kali ini untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas serta lebih terarah penulis memfokuskan kajian terhadap ulama pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama, pesantren yang merupakan suatu lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia. Pesantren sendiri merupakan sebuah lingkungan dimana didalamnya terdapat proses belajar mengajar agama islam dibawah kepemimpinan ulama (bisa disebut kiai, tuan, guru atau yang lainnya). Secara fisik, pesantren biasanya terdapat bangunan-bangunan khas yang merupakan sebagai tempat tinggal santri (orang yang belajar ilmu agama dipesantren), karena itulah muncul istilah pondok pesantren (Kompri, 2018, p. 16). Lingkungan pesantren mungkin memang terbatas dengan bangunan pesantren itu sendiri, namun pada dasarnya jangkauan pengaruhnya jauh lebih luas dalam masyarakat. Karena sesungguhnya keberadaan sebuah pesantren dalam lingkungan masyarakat salah satunya ialah adanya kepercayaan masyarakat terhadap ulama pemimpin pesantren tersebut, dengan adanya modal kepercayaan masyarakat terhadap ulama maka akan banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk belajar ilmu agama dengan tinggal dipesantren. Basis ulama pesantren yang semakin kuat ditengah masyarakat serta pandangan bahwa ulama pasti memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi dan retorika menarik, selain mengajar dipesantrennya ulama tersebut akan banyak diundang dalam berbagai acara untuk menyampaikan ceramahnya dengan begitu akan semakin kuat pengaruh ulama dalam masyarakat. Pengaruh kuat inilah menjadikan ulama memiliki modal kuat juga dalam politik. Hanya saja akan beragam satu ulama dengan ulama lain dalam menggunakan modal tersebut.

Ulama berbasis NU, penulis mengambil fokus pada ulama pesantren berbasis NU sebab aktivitas ulama terkait sebagian besar merupakan bagian dari Nu itu sendiri sehingga perlu kiranya penulis memberi kejelasan terkait ulama pesantren dalam lingkup NU. Nu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu wadah yang mana bukan hanya sebagai entitas agama melainkan jaringan para ulama dan pesantren dalam praktik keagamaan yang

¹ Akbar Faqih, *Keterlibatan Ulama dalam Politik*. Jakarta:2017). h 16-17

mengedepankan tradisi maupun kebebasan dalam berfikir keagamaan yang tidak sepenuhnya mengedepankan konservatisme (Jati, 2013, p. 99).

Berbicara tentang NU, di Indonesia organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama ini pada awal berdirinya sangat mengindari peran langsung dalam politik hal ini sejak pada tahun 1928. Nahdlatul Ulama lebih pada menekankan sebuah kepentingan sosial umat, kesejahteraan sosial yang mana menjadi kewajiban seorang muslim. Pada tahun 1973, organisasi NU ini pernah bergabung dalam kelompok muslim lainnya untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa itu pengikut Nahdlatul Ulama mencapai sekitar tiga puluh (30) juta, dan mereka menunjukkan sikap apolitifnya memilih Abdurahman Wahid sebagai pemimpin mereka pada tahun 1984.²

Organisasi Nahdlatul Ulama ini di dalamnya merupakan perkumpulan para kyai atau ulama yang saling membangkitkan baik antar ulama itu sendiri dan pengikutnya.³ Nahdlatul Ulama sangat meninggikan kedudukan ulama dimana kyai atau ulama adalah sentral yaitu baik sebagai pendiri pemimpin serta pengendali perkumpulan serta menjadi panutan warga *nahdliyin*. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama ini dilatar belakangi oleh kegelisahan para kyai maupun santri serta tokoh agama yang mana membutuhkan akan adanya legitimasi formal. Hal tersebut muncul akibat adanya dorongan dengan adanya berbagai organisasi sosial yang memiliki corak beragam, seperti halnya Budi Utomo pada 1908 merupakan organisasi yang berfokus pada pendidikan serta budaya serta menjadi pelopor berdirinya berbagai organisasi yang ada di Indonesia.⁴

Hadirnya Nahdlatul Ulama ini memunculkan harapan besar kepada para ulama atau kyai yang mana merekalah sebagai pengemban tradisi, sebagai jam'iyah keagamaan yang ada dalam Nahdlatul Ulama yang merupakan penekanan dalam bermadzab, mengadakan sebuah kegiatan baik berupa pengajian tentang agama yang baik serta menyelenggarakan sebuah pendidikan.

Melalui mukhtamar ke-19 di Palembang pada 1 Mei 1952 diputuskan untuk mendirikan sebuah partai politik Nahdlatul Ulama sebagai wajah baru serta menjadi sejarah baru dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan pada masa orde lama hadirnya Masyumi menjadikan semakin terisolasinya Nahdlatul Ulama oleh kelompok lain.⁵

² Eickelman, dkk. *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni pada Masyarakat Muslim*. Penerjemah Endi Haryono, Rahmi Yunita (Yogya: PT Tiara Wacana Yogya, 1998). h 66

³ Ali Maschan Moesa. *Kiai dan Politik; Dalam Wacana Civil Society* (Surabaya: LEPKISS, 1999). h 67

⁴ Einar Marhatan Sitompul. *NU dan Pancasila : Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) h 42

⁵ Chairul Anwar. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010) h 259

Menyadari hal tersebut, dari Nahdlatul Ulama mengambil sebuah keputusan untuk lepas dari persatuan yang beralaskan adanya perbedaan watak Nahdlatul Ulama dengan kelompok intelektual Masyumi, yakni pada pemahaman bentuk Negara dan strategi politik.

Menengok sejarah pada pemilihan umum pada tahun 1955, dimana dalam jangka waktu tiga (3) tahun Nahdlatul Ulama telah masuk dalam empat (4) partai unggul yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Kursi yang diperoleh oleh Nahdlatul Ulama menjadi empat puluh lima (45) kursi dari yang tadinya hanya memperoleh delapan (8) kursi.⁶ Begitulah pengalaman organisasi Nahdlatul Ulama dalam politik praktis.

Hal yang menarik juga pada warga *nahdliyin* dimana dalam partisipasi politiknya mereka memiliki ciri khas, yaitu kesetiaan dan ketaatan yang tinggi terhadap ulama atau kyai. Ulama selain menjadi elite agama juga sebagai panutan serta teladan yang utuh baik di lingkungan kecil seperti desa, kecamatan, hingga sampai kabupaten, provinsi, bahkan sampai pada tingkat pusat, ulama menjadi sorotan tersendiri dalam kegiatan politik. Hal ini terjadi karena eksistensi ulama yang terlibat dalam peranan sosial untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Karena seperti yang telah dibahas, bahwa kedudukan ulama dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini sangat tinggi, karena motor pergerakannya ialah bersumber dari ulama itu sendiri memberikan bimbingan serta arahan dalam memahami ajaran agama islam dengan pemahaman terhadap empat (4) mazhab dan mengawasi terhadap program yang dijalankan Nahdlatul Ulama itu sendiri.

Tokoh agama atau islam menyebutkan sebagai ulama dinilai memiliki daya tawar yang dibidang kuat dan menjanjikan dalam kontestasi politik yang merupakan produk dari demokrasi electoral. Hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 dimana kedua pasangan calon memperkenalkan dan mengampanyekan diri sebagai perwakilan dari kelompok islam. Wapres yang diusung cukup memberikan pengaruh terhadap suara dan kontribusi kelompok islam. Ulama dalam konstestasi politik dewasa ini semakin menjadi *infinity stones* yang diperebutkan oleh para politisi dan pihak-pihak yang bergelut dalam politik praktis. Namun, menjadi pertanyaan kritis bagi fenomena ini apakah para ulama ini baik dulu maupun sampai saat ini hanya menjadi pijakan sekedar objek yang mampu mendulang suara atau melalui pemilihan umum ini ulama menjadi subjek yang nantinya akan menjadi *kingmaker* dalam penentuan kebijakan.

Pada momen pemilihan umum atau Pilkada, para ulama dan juga tokoh masyarakat akan selalu menjadi ikon. Tidak dapa dipungkiri mereka menjadi panutan serta referensi

⁶ Eimar Martahan Sitompul. *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: LKIS, 2010) h 19

bagi sebagian masyarakat dalam menentukan pilihannya. Baik dalam menentukan pilihan calon atau pun memilih partai. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Purworejo pun, kecenderungan seperti ini terjadi juga. Para ulama atau kyai sedikit banyaknya terlibat dalam kontestasi ini. Setiap calon pasangan menunjukkan adanya dukungan ulama tertentu untuk melengkapi proses kampanye mereka. Dan tentu saja, bagi sebagian masyarakat khususnya warga NU ikut/nderek kyai adalah sebuah bentuk takdzimnya sehingga bukan fenomena baru ketika ulama menentukan pilihannya maka sebagian masyarakat tersebut akan mengikuti pilihan kyainya.

Penulis dalam kesempatan penelitian ini memang tidak menfokuskan pada kemenangan salah satu pasangan calon, tetapi lebih kepada melihat serta mengkaji adanya peran ulama Nahdlatul Ulama dalam proses kontestasi Pilkada ini. Penulis juga membatasi terhadap salah satu tokoh ulama besar di Kabupaten Purworejo ini. Penulis mengamati adanya gerak ulama maupun pasangan calon yang melakukan pendekatan terhadap ulama dalam rangka menarik simpati masyarakat serta menunjukkan adanya dukungan yang diberikan oleh ulama tersebut.

Pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Purworejo ini terdapat tiga (3) pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon tersebut yaitu (1) Agustinus Susanto dengan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto (keduanya bekerja pada sektor swasta), pasangan ini diusung oleh partai politik PDI Perjuangan, Gerindra, dan PAN; (2) H. Kuswanto (Anggota TNI) dengan Kusnomo (Anggota POLRI), pasangan ini diusung oleh partai politik PKB, Nasdem, dan PPP; (3) R.H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti (pasangan pertahana), pasangan ini diusung oleh partai politik Demokrat, Golkar, dan PKS.

seperti yang telah dibahas diatas bahwa warga *nahdliyin* memiliki ciri khas dalam menentukan pilihannya dalam berpartisipasi dalam pemilihan. Mayoritas yang cukup besar warga nahdliyin di Purworejo menjadikan para ulama atau tokoh agama sebagai referensi panutan dalam menentukan pilihannya. Sudah menjadi rahasia umum ketika melihat latar belakang partai maka akan terlihat pasangan calon yang akan mendapatkan dukungan banyak dari warga nahdliyin yaitu PKB dan PPP. Namun, pada praktiknya pasangan pertahanan Bastian dan Yuli memenangkan kontestasi Pilkada untuk dua (2) periode ini, mengalahkan pasangan Kuswanto dan Kusnomo yang di usung oleh PKB dan PPP. Karena pastinya warga NU di buat dilemma antara kedua pasangan calon ini. Namun, dalam kesempatan ini bukan alasan kemenangan yang akan dibahas tetapi lebih kepada adanya peran ulama Nahdlatul Ulama dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Purworejo ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kajian ini penulis mencoba menganalisis terkait dengan peran ulama yang berbasis NU dalam politik di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020. Dalam kesempatan ini penulis memfokuskan pada ulama karismatik KHRS. Hasan Agil Ba'bud pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo dan merupakan Mustasyar PCNU Kabupaten Purworejo masa khidmah 2019-2024, beliau juga merupakan demisioner Rais Syuriah PCNU Kabupaten Purworejo. Tulisan terkait ulama dan juga politik ini bukanlah yang pertama kalinya, sudah banyak kajian yang membahasnya. Tetapi dalam kajian yang saya tulis ini memberikan tampilan yang berbeda tentunya dengan penulisan lainnya, sehingga dengan harapan dapat menjadikan bertambahnya wawasan dengan kajian tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, banyak aspek yang dapat diteliti jika membahas peran Ulama dalam politik. Namun, penulis membatasi penelitian ini pada keterlibatan Ulama dalam politik khususnya dalam Pilkada serentak di Purworejo. Dengan fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ulama dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana relasi ulama dan penguasa (politisi) dimasa dan pasca Pilkada di Kabupaten Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran ulama dalam politik Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo;
2. Untuk mngetahui bagaimana relasi ulama dan penguasa (politisi) dimasa dan pasca Pilkada di Kabupaten Purworejo;

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan juga wawasan mengenai keterlibatan ulama dalam politik serta peran ulama pada Pilkada di Kabupaten Purworejo;
2. Meningkatkan kemampuan menulis penulis dalam menganalisis fenomena politik yang terjadi;
3. Sebagai bahan kajian kepustakaan pada lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang, terkhusus pada prodi Ilmu Politik.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa literatur sebagai acuan dan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sebagai instrument perbandingan penelitian penulis yang membahas tentang ulama dan politik, semakin banyak penelitian tentang ulama dan politik bukan berarti kajiannya tidak menarik lagi tetapi justru akan semakin berkembang dan semakin luas. Beberapa literatur sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh saudara Akbar Faqih Maula pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Keterlibatan Ulama dalam Politik (Studi Peran Ulama dalam Kemenangan Idris-Pradi pada Pemilukada Kota Depok tahun 2015)”⁷. Pada penelitian ini membahas terkait peran ulama dalam Pilkada yang mana membahas kekuatan politik kalangan ulama serta keikutsertaan ulama dalam pilkada yang akan memberi kemudahan untuk mendapatkan kemenangan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang ulama dalam politik serta keterlibatannya dalam Pilkada, namun pada penelitian Akbar lebih pada peran aktif dari ulama yang secara langsung terjun sebagai aktor politik.

Kedua, penelitian oleh saudari Eka Zalika Salamiah pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Peran Ulama dalam Pragmatisme Politik pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”⁸. Pada penelitian ini yang juga

⁷ Faqih Maula, Akbar. *"Keterlibatan Ulama dalam Politik (Studi Terhadap Peran Ulama dalam Kemenangan Idris-Pardi Pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Politik.* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah . 2017)

⁸ Zalika Eka.. *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Pada PILGUB 2018 (studi kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Pemikiran Politik Islam.* (UIN Raden Intan Lampung: 2019)..

membahas terkait peran ulama tetapi fokus kajian lebih kepada peran ulama yang menjadi figur teladan dalam dunia politik, dimana praktik politik yang tidak jarang banyak kekeliruan ulama hadir sebagai pengawas dan figur teladan dalam pemilihan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai peran ulama begitu pun dengan penelitian Akbar diatas, hanya saja fokus masing-masing berbeda.

Ketiga, penelitian dari saudari Tri Sundari pada tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul “Peran Politik Kyai di Pedesaan (Study kasus di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”⁹. Pada penelitian ini membahas mengenai peran kyai dalam lingkup desa, bahwa dalam tingkat desa pun peran kyai sangat besar tidak hanya perihal keagamaan saja tetapi politik sekalipun. Kesamaan penelitian ini adalah membahas mengenai peran ulama atau tokoh agama serta hubungan keduanya antara kyai dengan aktor politik.

Keempat, karya Ridwan Hasan dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan & Sikap Transformasi Politik Ulama dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Aceh”¹⁰. Jurnal ini membahas mengenai peran ulama dalam pemilu, ulama yang menjadi panutan masyarakat dalam berbagai hal salah satunya politik, jurnal ini menyampaikan peran ulama yang terdapat ulama aktif dalam partai politik serta ulama sebagai penengah dalam hiruk pikuk persaingan pada saat proses pemilu ulama menjadi symbol kedamaian serta mengajak masyarakat untuk tidak saling mendeskriminasi. Melalui jurnal ini penulis mendapat ilmu baru tentang peran ulama di Aceh.

Kelima, yaitu sebuah karya dari Imamuddin Abil Fida dalam jurnalnya yang berjudul “Ulama dan Politik: Mengurai Peran Ulama dalam Politik Era Modern”. Jurnal ini membahas mengenai perpolitikan saat ini, juga terdapat beberapa fokus didalamnya membahas bagaimana islam memandang politik. Dan yang relevan dengan apa yang akan menjadi kajian penulis ialah peran ulama dalam politik, pada jurnal ini menyatakan terkait fakta yang melekat dalam diri ulama yang memiliki posisi penting dalam sebuah tatanan masyarakat juga membahas bagaimana peranan ulama dalam politik yang memang terkadang ulama secara tidak langsung terjun dalam politik namun pada dasarnya peran mereka ikut mewarnai hanya saja terdapat beberapa memilih untuk tidak memihak golongan manapun untuk menjaga netralitas ulama itu sendiri. Melalui jurnal ini, penulis mendapat pencerahan kembali terkait ulama dan politik.

⁹ Sundari Tri.. *Peran Politik Kyai di Pedesaan (Studi kasus di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan.(UNNES: Semarang, 2015).

¹⁰ Hasan Ridwan. *Peranan Dan Sikap Transformasi Politik Ulama Dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Aceh*. Millah, Vol.XII, No. 2.2013

Keenam, berikut adalah jurnal dari Dinul Husnan & Mhd. Sholihin pada tahun 2017 dengan judul “Ulama, Islam, dan Gerakan Sosial-Politik: Reposisi Ulama dalam Gerakan Sosio-Politik Islam Indonesia”¹¹. Dalam jurnal ini membahas tentang eksistensi ulama yang mana gerakannya selaras perjuangan bangsa Indonesia, menjelaskan bahwa sejak awal peran ulama sangat penting dan memiliki pengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Jurnal ini relevan dengan penelitian ini karena kajian fokusnya yang membahas tentang gerakan ulama dengan politik Indonesia hanya saja dalam jurnal ini menhfokuskan pada seorang tokoh yaitu Syekh Musthafa Hussein Nasution.

Ketujuh, jurnal dari Agus Sutisna yang berjudul “Demokrasi Elektoral Pilkada Langsung: Tinjauan Teori dan Sisi Gelapnya”. jurnal ini membahas terkait proses pemilihan kepala daerah yang mana dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) yang intinya salah satunya dalam pemilihan kepala daerah harus dilakukan dalam prinsip demokrasi, Pilkada langsung memang menjadi alternatif pilihan yang menerapkan betul prinsip demokrasi, namun tak selalu teori akan sesuai dengan praktiknya yang mana dalam jurnal ini membahas terkait hal gelap dalam demokrasi electoral dan Pilkada langsung. Melalui tulisan ini, penulis mendapatkan ilmu seputar sisi- sisi lainh dalam Pilkada langsung.

Kedelapan, jurnal penelitian dari Ahmad fajri yang berjudul “Ulama & Politik Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi”¹². Dalam jurnal ini membahas terkait fatwa MUI dan bagaimana peran serta posisi MUI dalam dunia politik. Kesamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan ialah membahas tentang ada dan bagaimana peran terhadap politik. Melalui jurnal ini penulis dapat menambah referensi serta wawasan bagi penulis.

Selanjutnya, yaitu jurnal penelitian dari Sofyan Sawri yang berjudul “Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2017-2020: Studi atas friksi Politik-Agama dan pembedaan jejaring konstituen Anies-Sandi”. Jurnal ini membahas tentang fakta menarik dibalik kemenangan pasangan Anies-Sandi yang sangat berkaitan dengan faktor agama, pemilihan gubernur Jakarta pada saat itu memang sangat menharik bagaimana tidak, isu-isu agama sedanhg menguatnya sehingga membentuk politik identitas yangh menghasilkan identitas agama dalam politik praktis. Melalui jurnal ini penulis mendapat ilmu terkait berbagai peristiwa yang timbul pada saat pemilihan.

¹¹ Dinul Husnan & Mhd. Sholihin. Ulama, Islam, dan Gerakan Sosial-Politik: Reposisi Ulama dalam Gerakan Sosio-Politik Islam Indonesia. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan vol.2, no. 1, 2017.

¹² Ahmad Fajri. *Ulama & Politik, Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi*. (Tangerang: Talenta Pustaka Indonesia Perumahan Mutiara Elok,2014)

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastilah menggunakan metode penelitian sebagai bagian dalam penelitiannya. Pada kesempatan ini penulis ingin menganalisis sejauh mana peran serta keterlibatan ulama dalam politik electoral/Pilkada di Kabupaten Purworejo, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini pendekatan tersebut sangat cocok untuk digunakan. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan.

Pendekatan kualitatif dalam pandangan Kirk & Miller (dalam tulisan Pupu Saeful, 2009; 19) merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Artinya bahwa metode ini dalam mendapatkan data ialah secara langsung atau informan tertentu dalam bahasa dan pemahamannya sehingga peneliti mendapatkan data secara langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dekriptif yaitu sebuah cara dalam meneliti suatu peristiwa dengan menganalisis data-data deskriptif yang mana berupa kata-kata tertulis atau pun lisan dari informan tertentu atau perilaku yang dapat diamati, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berdasarkan tempat, peristiwa, dan informan.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan persepsi dalam memahami penelitian ini maka penulis sedikit mengulas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Pertama, ulama/kyai/pemuka agama merupakan sosok yang memiliki strata sosial cukup tinggi dalam suatu struktur sosial masyarakat. Ulama/kyai merupakan seseorang yang memiliki peran khusus di dalam kehidupan masyarakat disekitarnya baik secara langsung maupun tidak.

Kedua, Nahdlatul Ulama atau dalam penelitian ini PCNU Purworejo yang mana merupakan organisasi keagamaan. Organisasi ini memiliki banyak sekali

pengikut, serta ulama-ulama di dalamnya merupakan ulama yang memiliki pengaruh cukup besar ditengah masyarakat. organisasi yang juga terbilang tidak lepas dari sejarah politik ini semakin memainkan peranannya yang cukup signifikan, organisasi yang mampu memberi kekuatan dalam ranah pemerintahan walaupun tidak dikatakan sebagai organisasi politik tetapi pada dasarnya warga NU memiliki ruang yang bebas dalam kontestasi politiknya.

Ketiga, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan ditingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan Pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Walaupun terdapat perbedaan dalam cakupannya yang mana pemilu lebih pada cakupan nasional, Pemilukada merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pmimpin daerah.¹³ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah atau Pemilukada adalah instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi. Melalui pemilukada wujud nyata rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan, rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka dalam proses penyaluran aspirasi yang selanjutnya ialah menentukan arah masa depan sebuah Negara (Yusdianto, 2010:44). Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini konsep pemilukada yang dilakukan secara langsung merupakanh cara yang paling fektif dalam membangun konsep demokrasi.

3. Sumber dan Jenis Data

Penulis dalam kesempatan kali ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang mana memperolehnya atau mengumpulkannya dilakukan oleh peneliti secara langsung.¹⁴ Pada penelitian ini data primer yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari beberapa narasumber antara lain ulama, tokoh masyarakat, dan anggota partai di Kabupaten Purworejo melalui wawancara secara langsung sebagai sample yang ditetapkan.

b) Data Sekunder

¹³ Janpatar, Simamora. “Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis”.h 227.

¹⁴ M. Iqbal Hasan.. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia,2002. h 81.

Data sekunder merupakan sebuah data yang siap pakai atau sudah jadi dan telah dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang terkait. Data sekunder ini juga dapat disebut sebagai data yang tersedia.¹⁵ Data ini merupakan data pelengkap yang digunakan peneliti untuk melengkapi data yang telah ada, data ini dapat diperoleh dari buku, literature, karya, dan dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu antara lain dengan cara interaktif yang mana berupa wawancara dengan informan tertentu untuk menggali informasi secara mendalam. Selain interaktif, dapat juga secara non interaktif yang berupa pencatatan sebuah dokumen.

Dalam pengumpulan data mengutip teori Clifford Geertz (1973:19) yang mana proses dalam mengerjakan etnografi yaitu dengan melibatkan teknik seperti memilih informan (orang yang akan dijadikan sebagai narasumber), mencatat transkrip, dan menyimpan catatan lapangan. Serta hal yang penting ialah terkait “deskripsi padat”, tentang menjelaskan bagaimana kita menerima sebuah perspektif orang lain tentang suatu masalah. Clifford Geertz dalam hal ini menyatakan tentang menjelaskan “bangunan pikiran kita sendiri tentang bangunan pikiran orang lain tentang apa yang telah mereka dan rekan sebangsanya lakukan”.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data pendekatan kualitatif sendiri meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a) Wawancara

Teknik wawancara adalah percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi. Teknik wawancara yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah wawancara secara mendalam, menggali sebuah informasi untuk mendapatkan data yang lebih banyak pula. Dalam tulisan Pupu Saeful (2009:6) menyatakan bahwa wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka yang mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.

Wawancara secara mendalam akan menghasilkan kesesuaian yang tepat ketika berusaha dalam memahami motif serta interpretasi individu tertentu atau informan.

¹⁵ *Ibid.* h 81

Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara pun pengaruh peneliti dalam penyampaian secara tekstual pasti adanya dan juga bias dalam memaknai setiap kalimat yang disampaikan oleh informan mungkin saja bisa terjadi. Fielding (1993b:157) mengatakan bahwa penjelasan merupakan wujud memahami dan menafsirkan suatu tindakan, bukan menarik kesimpulan tentang relasi dan keteraturan antarvariabel statistik. Sehingga, wawancara mendalam merupakan berbicara tentang mendengar orang-orang berbicara untuk mendapatkan suatu wawasan tentang pandangan hidup mereka serta bagaimana mereka memandang sebuah fenomena sebagaimana adanya.

Penulis dalam melakukan wawancara kepada informan menggunakan wawancara/interview terpimpin yaitu sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan sederet pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Penulis melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi peran ulama pada Pilkada di Kabupaten Purworejo.

b) observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari data, yang mana untuk mendapatkan informasi tentang sebuah kejadian ataupun fenomena. Ratcliff, D (2001:75) mengemukakan bentuk observasi yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu: (1) Observasi partisipasi/participant observation yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan yang artinya peneliti terlibat dalam keseharian responden, (2) Observasi tidak berstruktur yaitu yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek, (3) Observasi kelompok yaitu dilakukan secara berklompok terhadap bebertapa objek sekaligus.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh peneliti penelitian kualitatif dalam memperoleh data yang mana dengan memperoleh data dari sudut pandang subjek melalui suatu media baik tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau pun dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan¹⁶. Peneliti mengumpulkan informasi terkait Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo.

¹⁶ Haris Herdiansyah. *Metdologi Penelitian Kualitatif*, h143.

G. Sistematika Penulisan

Dalam system kepenulisan ini agar mendapatkan sebuah tulisan yang komprehensif serta saling berkesinambungan kiranya perlu membaginya menjadi beberapa bab, maka penulis menjadikan lima bab secara berurutan sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini penulis menguraikan terkait beberapa sub bab yaitu memaparkan pernyataan masalah yang berkaitan dengan keterlibatan serta peran Ulama dalam politik pada Pilkada Kabupaten Purworejo. Berikutnya yaitu menuliskan rumusan masalah terkait dengan pernyataan masalah terkait, kemudian menuliskan tujuan dan juga manfaat penelitian. Tinjauan pustka, yang mana berisikan terkait penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Terakhir yaitu metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan ini.
- **Bab II Kerangka Teori.** Pada bab ini membahas terkait kerangka berfikir mengenai pengertian ulama dan penjelasan terkait. Landasan teori yang digunakan konsep peran.
- **Bab III Gambaran Umum & Objek Penelitian.** Pada bab ini menguraikan terkait gambaran umum Kabupaten Purworejo dan juga objek penelitian penulis.
- **Bab IV Hasil Penelitian & Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi di Kabupaten Purworejo.** Pada bab ini penulis menguraikan hal terkait yaitu bagaimana peran seorang ulama dalam ranah politik, yang pada kesempatan ini lebih mengerucut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo.
- **Bab V Analisis Relasi Ulama dengan Penguasa (Politisi).** Pada bab ini penulis menguraikan terkait bagaimana relasi antara ulama dengan para penguasa (politisi)
- **Bab VI Penutup.** Pada bab terakhir ini adalah berupa penutup yang berisikan simpulan dan saran. Dalam kesimpulan disampaikan hasil penelitian dimulai dari bab I-V.

BAB II

Ulama, Konsep Peran & Karismatik Leader

Pada bagian ini penulis akan menyampaikan beberapa konsep maupun teori yang mana digunakan penulis dalam penelitian kali ini. Penulis membahas terkait peran ulama dalam politik khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada kesempatan ini penulis menfokuskan penelitian terhadap salah satu tokoh ulama di Kabupaten Purworejo. Sehingga perlu untuk disampaikan terkait beberapa hal yang dapat membantu dalam memahami apa yang diampaikan oleh penulis. Berikut beberapa point diantaranya ; latar belakang pengertian ulama, konsep peran, dan kepemimpinan karismatik (karismatik leader):

A. Pengertian Ulama

Ulama adalah mereka yang memiliki ilmu agama yang tinggi serta perilaku yang baik, demikian secara sederhana mengartikan kata “ulama”. Ulama merupakan warasatul anbiya, berikut Rasulullah SAW bersabda:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi.” (HR At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda radhiallahu’anh).
Ulama memiliki kedudukan tersendiri dalam sebuah struktur masyarakat, pasalnya beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari pun tak jarang masyarakat memilih untuk *sowan* atau menemui ulama untuk meminta solusi dan lainnya. Ulama sendiri memang seperti sudah didesain sebagai seseorang yang selain unggul dalam keilmuannya juga menjadi panutan serta *ngemong* masyarakat.

Setelah Rasulullah SAW wafat yang mana beliau merupakan khotamun nabiyyin yang telah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan makhluk Tuhan lainnya serta beliau menjadi pemimpin di muka bumi ini, maka kepemimpinan tersebut dilanjtkan oleh para ulama yang mana mereka menyampaikan atau pun meneruskan dakwah Rasulullah SAW dengan kata lain ulama merupakan pewaris para nabi. Dengan demikianlah ulama sebagai pewaris nabi, maka ulama merupakan tempat rujukan umat yang memiliki tanggungjawab untuk membimbing masyarakat siap untuk menjadi perantara agar seseorang mengenal Tuhannya.

Mengutip dalam Eza Zalika (2018:17) Clifford Geerts menjuluki ulama sebagai *cultural bloker* (perantara budaya) maksud dari pernyataan Clifford yaitu ulama memiliki empat peran utama, yaitu; peran ulama dalam mengajarka perihal pengetahuan tentang agama, ulama sebagai *problem solver* yaitu perihal permasalahan social, ketiga ialah ulama memiliki peran sebagai *agen of control* kemajuan serta perkembangan social dan kehidupan masyarakat, terakhir yaitu ulama sebagai penghubung dari perubahan yang terjadi itu sendiri.

Di Indonesia misalnya ulama yang mana mereka memiliki jamaah yang tidak sedikit sehingga mendirikan sebuah pondok pesantren sebagai tempat untuk menuntut ilmu guna memperdalam pengetahuan agama., atau ulama yang berdakwah pada tempat satu ketempat yang lainnya. Secara umum, ulama pastilah mereka yang menyebarkan perihal keilmuan terutama agama. Namun, zaman yang semakin maju serta kedudukan ulama yang semakin diperhitungkan oleh masyarakat luas menjadikan ulama tidak hanya menjadi rujukan perihal agama saja melainkan lebih luas dari itu bahkan dalam bersosial serta politik ulama tak jarang hadir pada lingkup tersebut. Terlebih saat ini, ulama pasti memiliki jamaah atau pengikut yang jumlahnya tidak sedikit menjadikan eksistensi ulama semakin kuat.

Secara umum masyarakat islam di Negara Indonesia memberikan julukan/panggilan terhadap orang yang memiliki kemampuan agama lebih dengan sebutan Kiai Haji (K.H.) yang mana dengan dasar pada krikteria sebagai berikut ini:

1. Dari Unsur Kapabilitas
 - a) Memiliki wawasan ilmu agama yang tinggi
 - b) Memiliki sikap/perilaku yang saleh
 - c) Memiliki sebuah pondok pesantren, majelis jamaah, atau pun lembaga pendidikan (madrasah)
 - d) Memiliki akhlak yang baik
 - e) Telah menjalankan ibadah haji.
2. Dari Unsur Akseptabilitas
 - a) Memiliki daya Tarik atau kekhasan dalam dakwah sehingga sertikng dakwah dimasyarakat secara luas
 - b) Mashur dikalangan masyarakat luas
 - c) Memiliki santri dan pengikut yang banyak
3. Dari Unsur Sosial
 - a) Memimpin sebuah kegiatan sosial keagamaan

- b) Sebagai penengah atau bahkan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹⁷

Dalam pandangan Clifford Geertz posisi sosial seorang ulama seperti itu melihat dari kedudukannya ulama sebagai kelompok elit kaum santri yang selain mengutamakan ajaran islam dalam kehidupan serta penerapannya¹⁸ juga merupakan salah satu unsur pemimpin bagi umat yang menempati kedudukan sebagai perantara. Dalam kesempatan kali ini, penulis yang akan mengulas perihal peran ulama dalam dunia perpolitikan, menjadi perlu kiranya mengetahui seberapa jauh ulama masuk kedalam dunia perpolitikan bukan sebagai kontestan tetapi dalam proses nya seberapa besarnya peran dari ulama dalam kesempatan ini yaitu dalam Pilkada di Kabupaten Purworejo.

Pada penelitian ini penulis mengamati terkait ulama NU yang mana menjadi perhatian serta hal yang menarik. Komunitas besar NU di wilayah Purworejo ini tidak memungkiri bahwa gerak ulamanya juga sangat memberi pengaruh pada masyarakat terlebih pengikutnya, serta tentang keunikan yang telah di bahas sebelumnya bahwa warga *nahdliyin* memiliki khas tersendiri dalam partisipasi politiknya menjadikan sosok ulama sebagai panutan dan referensi.

Melihat kekhasan warga NU yang mana dalam partisipasinya terhadap politik masih sangat menginduk pada ulama tertentu. hal ini dapat dikatakan sebagai perilaku politik yang aplikasinya kita sebut sebagai partisipasi politik. Kegiatan politik hakikatnya dilakukan oleh mereka warga Negara yang memiliki jabatan di pemerintahan maupun warga Negara biasa, dan pemerintahlah yang memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan politik. Namun, masyarakat juga dapat terlibat didalamnya ikut mempengaruhi proses pembuatan dan juga pelaksanaan keputusan tersebut. Dan dengan sikap itulah masyarakat telah melaksanakan sebuah perilaku politik. Perilaku politik ini bisa berbentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan dan sikapnya serta pilihan dalam kontstasi pemilu atau pilkada.

Dengan demikian dapat dikatakan ada dua arah yang terlibat dalam hal ini, yaitu pemerintah yang dipegang oleh pemerintahan tersebut dan politik itu sendiri yang dipegang oleh individu/kelompok dalam masyarakat. dengan begitu dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga non politik pun dapat memberi pengaruh masyarakat guna menyampaikan

¹⁷ Rojikin. "Peranan Ulama dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Suatu Kajian Sosiologi Hukum dengan Pendekatan Ketahanan Nasional". (Jakarta: Tesis S2, PKN-UI, 1999). h 35-36.

¹⁸ Clifford Geertz. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (terjemahan bahasa Indonesia oleh Aswab Mahasin), Pustaka Jaya, Jakarta, 1981, h.173.

aspirasinya kepada pemerintah. Karena sekarang ini partai politik tidak selalu dapat menampung dan menjadi ulur tangan aspirasi masyarakat. terlebih apabila lembaga non politik ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan kebijakan dari pemerintah, seperti organisasi Nahdlatul Ulama.

B. Kepemimpinan Karismatik

(James L. Gibson, 2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa kepemimpinan karismatik adalah kualitas yang timbul pada diri seorang pemimpin dalam memberi pengaruh pada pengikutnya dengan menggunakan anugerah supranatural dan kekuatan pengikutnya. Gibson juga menambahkan definisi gaya kepemimpinan karismatik adalah kualitas pemimpin dalam mengidentifikasi secara tepat.

Menurut Yukl (Yukl, 1994) pemimpin karismatik memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut:

1. Memiliki perilaku dan sikap yang dipercaya anggotanya bahwa pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kompetensi sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut akan memberikan kesan dan kepercayaan bagi anggotanya, sehingga anggota tersebut akan lebih patuh dan taat.
2. Perilaku yang menekankan pada tujuan-tujuan ideologis yang berkaitan dengan tujuan bersama dengan berdasarkan nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi anggotanya.
3. Memiliki visi yang menarik tentang gambaran masa depan organisasi sehingga tercipta kedekatan emosional diantaranya.
4. Memberikan contoh kepada anggotanya dengan perilaku agar anggotanya mengikutinya.
5. Memiliki perilaku yang menmbulkan motivasi kepada anggotanya untuk pencapaian tujuan bersama.

Dari uraian terkait kepemimpinan karismatik diatas memertikan gambaran tentang bagaimana pemimpin dalam hal ini ulama memiliki karismatik yang luar biasa bagi para pengikutnya sehingga eksistensi ulama menjadi sangat besar dalam kehidupan masyarakat disekitarnya yang memiliki pengaruh serta menjadi rujukan dalam berbagai lingkup kehidupan baik sosial, ekonomi, sampai politik.

C. Teori Peran

Mengulas perihal peranan akan sangat dekat dengan posisi atau kedudukan seseorang, karena walaupun dua kata ini berbeda namun keduanya saling memiliki

keterkaitan. dimana seseorang yang dilekatkan dengan peranan pastinya memiliki sebuah kedudukan atau bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki nilai tersendiri pada struktur masyarakat. peran seseorang dalam suatu tatanan masyarakat pastinya memiliki perbedaan, bahwa individu satu dengan individu lainnya tentu memiliki porsi perannya masing-masing sesuai dengan status mereka dalam masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalamnya di sampaikan bahwa peran merupakan bagian dari sebuah tugas yang harus dilakukan oleh individu tertentu sebagai bagian dari tugas utamanya dalam sebuah momen/peristiwa.¹⁹

Biddle & Thomas mengatakan bahwa peran (role) merupakan seperangkat tingkah laku/sikap yang keluar dari seseorang atau dalam hal ini ulama yang diharapkan karena kedudukan yang dimilikinya dalam suatu tatanan masyarakat.²⁰ Biddle & Thomas juga menjadikan teori peran ini menjadi 4 (empat) kategori yaitu sebagai berikut:

1. *Expectation* (harapan), harapan dalam peran ini ialah harapan-harapan orang lain tentang sikap atau perilaku yang seharusnya dimiliki atau ditunjukkan oleh seseorang yang dia memiliki posisi tertentu. Dalam penelitian ini ialah harapan dari masyarakat/khususnya jamaah dimana mereka memiliki harapan akan sikap/perilaku ulama yang mereka takdzimi sesuai dengan porsinya, bagaimana harapan masyarakat terkait ulama dengan adanya kontestasi Pilkada ini.
2. *Norm* (norma), Norma sendiri merupakan salah satu bagian dari harapan. Dalam hal ini harapan tentang bagaimana seseorang itu menyikapi atau berperilaku yang sesuai dengan harapan orang lain. Seperti ulama dalam Pilkada ini memberikan dukungan atau peran yang di tunjukan.
3. *Performance* (wujud perilaku), wujud perilaku ini merupakan sikap/perilaku dalam peran, dan hal ini berupa kenyataan dalam lapangan bukan hanya harapan. Misalkan dalam masyarakat memiliki harapan bahwa ulama seharusnya memiliki sikap yang netral terhadap politik/kandidat calon serta ulama enjadi jembatan masyarakat dalam menentukan pilihan seuai dengan harapan masyarakat itu sendiri (ulama menjadi salah satu fasilitator masyarakat dalam menentukan pilihan tanpa menggiring terhadap pasangan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h 667.

²⁰ Dari Biddle & Thomas, E.J. *Role Theory: Concept and reseach*. New York: Wiley . dalam kutipan Rahmat A. dan Alamsyah. *Peran Ganda: Perkembang Hubungan Sosial Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. V 3 No 2: 2018. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP. h 05

calon tertentu). Tetapi pada kenyataannya ulama memiliki kecenderungan terhadap salah satu pasangan calon memberikan dukungan, walaupun demikian ulama juga tetap menghargai pasangan calon lainnya.

4. *Evaluation* (penilaian), dalam kategori ini merupakan sebuah penilaian dimana masyarakat memberikan kesan baik itu positif atau negative terhadap ulama atas sikap yang ditunjukkan.

Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam sebuah masyarakat (*social-position*) adalah sebuah unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap individu memiliki suatu posisi atau pun tempat dalam struktur masyarakat dengan menjalankan peranannya.²¹

Berikut terdapat beberapa dimensi dari peran, yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, bahwa peran digunakan sebagai sebuah instrumen atau pun alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam sebuah proses pengambilan keputusan, hal ini diambil dari persepsi bahwa sebuah pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat sehingga kritikan, atau masukan dari masyarakat merupakan suatu hal yang penting evaluasi.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, bahwa peran digunakan sebagai cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha consensus dari pendapat-pendapat yang ada.²²

Mengutip dari M. Alfi Syahri dari Scott et al (1981) dalam Kanfer (1987: 197) terdapat lima aspek yang penting dari peran yaitu:

1. Peran sendiri memiliki sifat impersonal yaitu posisi peran itu menentukan harapannya, bukan individunya.

²¹ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet 7 (Jakarta: Rajawali, 1986),h 221.

²² Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta: Walhi, 2003)

2. Peran berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan.
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan tidaklah sama, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan dapat memainkan beberapa peran.

Peran seorang ulama di tengah-tengah kehidupan masyarakat beragama dalam memimpin serta membangun moral dan juga lingkup pikiran yang agamis sangatlah menarik dikalangan masyarakat, untuk terciptanya manusia yang dapat memberikan kemajuan dalam berbagai aspek. Pentingnya sebuah keterlibatan para pemuka agama dengan kata lain keterlibatan pemuka agama dalam aspek yang lebih luas yakni membangun masyarakat, juga sebagai motivator, membimbing, serta pemberi landasan etis dan moral, bahkan juga sebagai mediator alam segala aspek pembangunan.²³

Peran dalam penelitian ini ialah penulis ingin mengkaji terkait peran atau gerak ulama dalam Pilkada di kabupaten Purworejo. Melihat bahwa kebebasan politik, dalam artian setiap individu bebas mengekspresikan pilihannya dalam politik serta dalam partisipasi politik.

²³ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. hlm 138. Dalam kutipan oleh Eza Zalika. *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (Studi Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*, hlm 36.

BAB III

Gambaran Umum Kabupaten Purworejo & Objek Studi

A. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

1. Sejarah Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan daerah kabupaten yang masuk wilayah Jawa Tengah. Pada 5 Oktober 901 M ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Purworejo bertepatan dengan peristiwa ditemukannya sebuah prasasti Kayu Ara Hiwang di Desa Boro Wetan (Kecamatan Banyuurip) yang sekarang telah disimpan di Museum Nasional Jakarta investasi D 78. Dalam prasasti tersebut memberikan informasi bahwa telah diadakan sebuah upacara besar yang dihadiri oleh beberapa pejabat dari berbagai daerah yaitu antara lain Watu Tihang (Sala Thang), Gulak, Parangran Wadihadi, Padamuan (Prambanan), Mntyasih (Matesh Magelang), Mdang, Pupur, Taji (Taji Prambanan), Pekambingan, Kalungan (Kalongan, Loano)²⁴. Sehingga dalam sidang DPRD Kabupaten Purworejo pada tanggal 5 Oktober 1994 melalui peristiwa tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Purworejo.

2. Letak Geografis Kabupaten Purworejo

Secara geografis Kabupaten Purworejo termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dengan jarak bentangan Utara ke selatan yaitu kurang lebih 83,7 km dan jarak bentangan Timur ke Barat kurang lebih yaitu 99,8 km pada posisi yaitu antara $109^{\circ} 47' 28''$ - $110^{\circ} 8' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32' - 7^{\circ} 54''$ Lintang Selatan²⁵ dengan ketinggian antrara 0 sampai dengan 235m diatas permukaan laut (dpl). Luas wilayah Kabupaten Purworejo yaitu 1.034,82 km² terdiri kurang lebih 2/5 dataran dan 3/5 daerah pegunungan

Kabupaten Purworejo sendiri Daerah Tingkat II Purworejo merupakan daerah yang menghubungkan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bagian Selatan. batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Magelang;

²⁴ Purworejokab.go.id (29-12-2020; 11:27).

²⁵ BPS. *Kabupaten Purworejo Dalam Angka Purworejo Regency in Figure 2020*. Hlm 36.

Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY;
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;
Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Purworejo



(<http://desakrendetan.blogspot.co.id/2016/09/peta-kabupaten-purworejo.html>)

Sedangkan secara topografis wilayah Kabupaten Purworejo beriklim tropis basah dengan suhu antara 19c-28c dengan kelembapan udara antara 70%-90% serta curah hujan tinggi pada bulan desember 311mm dan bulan maret 289mm. di wilayah Purworejo sendiri terdapat beberapa sungai diantaranya ialah Sungai Wamer/ Kali Medono, Sungai Bogowonto, Sungai Jali, Sungai Gebang, Sungai Bedono, Sungai Kedunggupit, Sungai Kadil, dan Sungai Kalimeneng yang berhulu di Pegunungan Serayu Selatan, juga terdapat Sungai Jebol, Sungan Ngemnan, Sungai Dulang dan Sungai kaligesing berhulu di pegunungan Menoreh. Gunung yang terdapat di Kabupaten Purworejo antara lain Gunung

Pupur, Gunung Mentosari (1.059 m), Gunung Rawacacing (1.035 m), Gunung Gambarjarian (1.035 m), Gunung Gepak (859 m), dan Gunung Ayaayam (1.022 m).²⁶

Kabupaten Purworejo terdapat 16 kecamatan dan 494 desa. Luas kabupaten menempati area 1.034.81752 km². Kecamatan Bruno merupakan kecamatan terluas dengan luas kurang lebih 108.43 km² dan Kecamatan Kutoarjo merupakan kecaamatan terkecil dengan luas 37.59 km². Adapun jarak Ibukota Purworejo dengan Ibukota Kabupaten lainnya di sekitar sebagai berikut:

- Purworejo-Magelang : 43.3 km
- Purworejo-Wonosobo : 53.8 km
- Purworejo-D.I.Yogyakarta : 65.4 km
- Purworejo-Kebumen : 43.2 km

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah, dan Tinggi Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah.(ha)	Tinggi Ibu Kota Kecamatan (m)
1.	Grabag	32	6492.05	2.5
2.	Ngombol	57	5526.93	12
3.	Purwodadi	40	5395.93	12
4.	Bagelen	17	6376.28	17
5.	Kaligesing	21	7472.9	200
6.	Purworejo	25	5272.08	63
7.	Banyuurip	27	4508.5	12
8.	Bayan	26	4321.15	19
9.	Kutoarjo	27	3759.44	26
10.	Butuh	41	4607.69	10
11.	Pituruh	49	7742	18
12.	Kemiri	40	9204.54	20
13.	Bruno	18	10843.02	325
14.	Gebang	25	7186.08	85

²⁶ *Ibid.* h 40

15.	Loano	21	5365	78
16.	Bener	28	9408.16	150
	Kab. Purworejo	494	103481.75	

Sumber Data: Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

3. Potensi Ekonomi Kabupaten Purworejo

Pada wilayah kabupaten Purworejo terkait potensi ekonomi yang dapat dikembangkan terdapat tiga (3) sudut pandang yaitu, sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi yang dapat dikembangkan yang meliputi wilayah perkotaan Purworejo–Kutoarjo ialah kawasan Anglomerasi – kutoarjo berbasis jasa, perdagangan, dan industri.
- b) Sosial budaya yang meliputi kawasan prasasti Kayu Arahiwang di Desa Boro Wetan Kec. Banyuurip, alun-alun Purworejo, dan kawasan petilasan WR. Supratman di Desa Somongari Kec. Kaligesing.
- c) Fungsi serta daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan DAS, pegunungan Menoreh, pegunungan Serayu Selatan, pantai berhutan bakau dan TPA sampah tumpeng di Desa Jetis Kec. Loano.

B. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memang menuai beberapa konflik dimana pelaksanaan Pilkada ditengah-tengah musibah wabah virus corona. Sehingga dengan beberapa pertimbangan kemudian diputuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pilkada serentak 2020 ini khususnya di Jawa Tengah diikuti oleh 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota yang dilaksanakan serentak pada Rabu 9 Desember 2020. Terdapat beberapa peraturan baru yang ditetapkan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini dimana petugas KPPS telah diberi arahan serta anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan seperti petugas KPPS telah menjalani rapid test serta pemeriksaan kesehatan, saat bertugas petugas KPPS wajib menggunakan masker, face shield, sarung tangan sekali pakai, serta pemeriksaan suhu pada pemilih yang datang ke TPS. Hal demikian merupakan bentuk dari ikhtiar serta konsekuensi tetap dijalankannya Pilkada pada tahun 2020.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo

Pelaksanaan Pilkada 2020 serentak yang dilakukan pada Rabu 9 Desember 2020, dengan rangkaian sebagai berikut; (1) Pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4-6 September 2020 di KPU Kabupaten Purworejo, (2) Penerimaan dokumen perbaikan (persyaratan calon bupati & wakil bupati Purworejo tahun 2020) pada 14-16 September 2020, (3) Pembentukan KPPS meliputi; pengumuman pendaftaran (1 s.d 6 Oktober 2020), penerimaan berkas pendaftar (7 s.d 13 Oktober 2020), perpanjangan pendaftaran (14 s.d 18 Oktober 2020)., (4) Tahapan Kampanye pada 26 September – 05 Desember 2020 (pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau terbuka, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, kegiatan lain: media sosial/daring; penyebaran bahan kampanye, penayangan iklan kampanye 22 September 2020 s.d 05 Desember 2020, (5) Masa tenang 6 s.d 8 Desember 2020.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo terdapat tiga (3) pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut yaitu (1) Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto (keduanya bekerja pada sector swasta), diusung oleh partai politik PDI Perjuangan, Gerindra, dan PAN; (2) H. Kuswanto (anggota TNI) dan Kusnomo (anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)), diusung oleh partai politik PKB, Nasdem, dan PPP; (3) R. H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti (pasangan pertahana), diusung oleh partai politik Demokrat, Golkar, dan PKS.

Gambar 1.2



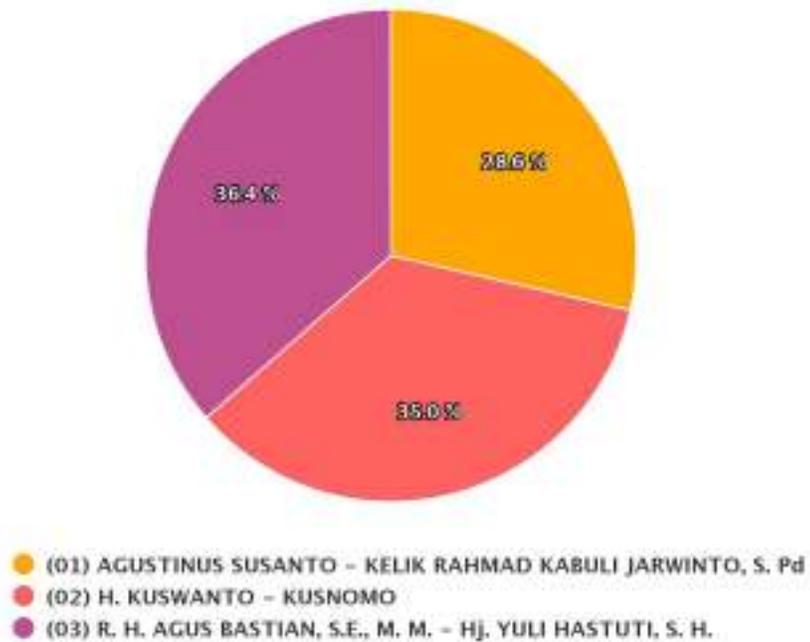
(sumber: <https://kpud-purworejokab.go.id/home/>)

Melihat ketiga calon pasangan kandidat, secara politik satu sama lain memiliki kekuatan tersendiri. Melihat dari segi latar belakang kandidat untuk pasangan calon no urut 3 misalnya dimama R.H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti yang merupakan bupati dan wakil bupati yang masih menjabat di Kabupaten Purworejo hal ini menjadikan pasangan tersebut memiliki potensi lebih besar dikenal oleh masyarakat Purworejo. Pada pasangan calon no urut 2 yaitu H. Kuswanto dan Kusmono, disini kita lihat dari partai politik pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati ini dimana terdapat Partai PKB dan PPP yang diketahui merupakan partai yang memiliki kekuatan cukup besar dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang NU, tidak bisa dipungkiri kedua partai politik tersebut memang cenderung melibatkan masa yang banyak dari orang-orang NU. Sementara, pasangan calon no urut 1 yang diusung oleh partai PDI Perjuangan, Gerindra, dan PAN memang harus lebih berjuang dalam memperkenalkan diri mereka pada masyarakat luas, pasalnya latar belakang “kepercayaan” yang berbeda sangat menjadi perhatian serta kecenderungan masyarakat untuk memilih pemimpin. Kita tahu bahwa mayoritas masyarakat yang Bergama islam tentunya akan sulit untuk melihat dari segi lain pada pasangan calon terlebih perbedaan “kepercayaan” ini masih sangat krusial.

3. Hasil Perhitungan Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak yang dilaksanakan pada Rabu 09 Desember 2020, khususnya di Kabupaten Purworejo yang terdiri dari tiga (3) pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu sebagai berikut:

Table 1.2



(Sumber: [Http://pilkada2020.kpu.go.id/](http://pilkada2020.kpu.go.id/))

- Pasangan No 1 : Agustinus Susanto - Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto; Total suara masuk: 115 783 dengan persentase suara 28,6 %.
- Pasangan No 2 : H. Kuswanto – Kusnomo; Total suara masuk; 141 793 dengan persentase suara 35,0 %.
- R. H. Agus Bastian, S.E, M.M. – Hj. Yuli Hastuti, S.H.; Total suara masuk: 147 658 dengan persentase 36,4%.

Table 1.3

**HITUNG SUARA
PEWILAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO**

Program 1911 dan 1911 TE (SUARA)

Kecamatan	PSU	PJU	PJU	PJU
BRANDASARI	100.00%	5.719	3.395	11.914
BOJONEGARA	100.00%	6.019	4.271	9.825
BRANDASARI	100.00%	1.419	5.784	2.291
KALIREJO	100.00%	8.938	2.577	4.186
SOARASELO	100.00%	2.621	7.809	6.154
BRANDASARI	100.00%	11.185	12.748	19.293
KAMPISARI	100.00%	5.638	5.458	3.327
ALONG	100.00%	4.937	17.817	11.217
SUTOWILO	100.00%	2.130	11.150	5.747
BUNDIRI	100.00%	6.124	10.078	6.427
BRANDASARI	100.00%	10.975	17.414	14.481
GENE	100.00%	10.254	11.521	9.879
BRANDASARI	100.00%	6.212	9.252	6.192
BRANDASARI	100.00%	4.184	8.341	4.924
KASRI	100.00%	5.146	7.621	6.211
ALONG	100.00%	1.667	12.610	10.451

Keterangan:
 (1) PSU: KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN BERKUALITAS
 (2) PJU: KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN BERKUALITAS
 (3) PJU: KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN BERKUALITAS

Page 19-12-2022 10:40:13

(Persentase perolehan suara dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Purworejo, Sumber: [Http://pilkada2020.kpu.go.id/](http://pilkada2020.kpu.go.id/))

C. Ulama & Pesantren di Kabupaten Purworejo

1. Pesantren di Kabupaten Purworejo

Di Indonesia pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan pertama dimana didalamnya sudah ada system belajar mengajar. Di Kabupaten Purworejo sendiri terdapat kurang lebih 91 pondok pesantren. Jumlah yang cukup banyak memang, terlebih saat ini pendidikan pesantren mulai diperhitungkan sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus akan kajian keislaman tetapi lulusan pesantren pun siap untuk bersaing dengan lembaga pendidikan diluar. Pesantren di Purworejo salah satunya yaitu Pondok Pesantren Mahadil ‘ulumis Syar’iyyah yang didirikan oleh KH. Kholil Abdul Rasyid (Alm), Pondok Pesantren Al Iman yang dipimpin oleh KH. Hasan Agil Ba’bud, PP. An Nawawi yang dipimpin oleh KH. Ahmad Chalwani, PP. API yang dipimpin oleh KH. Nasihin, pondok

pesantren tersebut merupakan salah satu dari sekian pondok yang terdapat di Purworejo yang berbasis NU. Dalam kesempatan ini, penulis yang mengambil focus pada ulama di Kabupaten Purworejo, KH. Hasan Agil Ba'bud merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus.

2. Profil Pondok Pesantren Al-Imam Bulus

Pondok Pesantren Al-Iman terletak di Jl. Adipurwo, Bulus, Purworejo, Jawa Tengah. letak pesantren ini memang cukup jauh dari pusat keramaian kota Purworejo. Namun letak pesantren yang tidak berada pada keramaian inilah menjadi semakin asri dan menenangkan sebagai tempat menimba ilmu. Pondok pesantren Al-Iman ini dulu bernama al-Islamiyah, didirikan oleh Mbah Yai Ahmad Alim pada tahun 1700an atau 1750an. Dan merupakan pondok pesantren tertua di Kabupaten Purworejo.

Pondok pesantren ini semakin berkembang dan memiliki santri dengan jumlah yang cukup banyak, salah satu santri yang alim dan mashur ialah kyai Shaleh Darat Semarang. Setelah Mbah Yai Ahmad Alim wafat, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh menantunya Raden Sayyid Ali pada tahun 1800an. Setelah beliau Raden Sayyid Ali wafat, kepemimpinan pesantren diberikan kepada putranya yaitu Sayyid Muhammad kemudian diteruskan oleh Sayyid Dahlan.

Pondok pesantren ini sempat mengalami vakum akibat kepindahan kyai ke Kauman, Masjid Jami' Purworejo. Kemudian pondok pesantren ini dihidupkan lagi sekitar tahun 1955an oleh Khadratul walid. Dengan kembalinya aktif pondok pesantren ini yang dulunya bernama al-Islamiyah kemudian diganti menjadi "Al-Iman". Selain sebagai pesantren tertua di Purworejo, pesantren Al-Iman juga pesantren pertama yang menggunakan pembelajaran metode klasikal serta kurikulum tertentu dan bertahap. Penggunaan metode demikian terjadi pada masa Sayyid Agil yang pada saat itu masih tergolong baru dilingkungan Purworejo.

Pondok pesantren yang pada saat itu mengembangkan pesantren salafiyah madrasah, Sayyid Agil mengembangkan juga pendidikan formal dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Hingga sampai saat ini kepemimpinan Sayyid Agil juga mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), jumlah santri pun sudah mencapai ribuan.

- a) Sarana & Prasarana PP. Al-Iman Bulus Gebang Purworejo

Pondok Pesantren Al-Iman ini mengalami kemajuan yang cukup pesat . bertambahnya jumlah santri, pembangunan pondok dan juga madrasah menjadi sangat penting, diantaranya yaitu:

- 1) Bangunan Pondok, Pondok Pesantren telah memiliki bangunan pondok yang cukup banyak kurang lebih 6 (enam) bangunan yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kamar santri, 5 (lima) kantor, 30 (tiga puluh) kamar mandi, 20 (dua puluh) toilet, 2 (dua) koperasi, dan 3 (tiga) dapur.
 - 2) Ruang belajar, yaitu memiliki bangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta Mahad Ali. Kurang lebih terdapat 5 (lima) bangunan tempat belajar mengajar, 2 (dua) kantor, 3 (tiga) perpustakaan, dan 31 (tiga puluh satu) ruang kelas, beberapa bangunan pun telah terkoneksi dengan internet.
 - 3) Terdapat masjid di area pondok dan juga madrasah serta mushola di area pondok putri.
 - 4) Dll.
- b) System Pendidikan PP. Al-Iman Bulus

Pondok Pesantren AL-Iman sendiri memiliki system pembelajaran secara bertingkat / berjenjang dimulai dari tingkat *Ibtida'*, *Tsanawy*, *Ulya*, dan *Takhasus*. System pembelajaran madrasah seperti pada sekolah formal pada umumnya, namun pada madrasah di Al-Iman sendiri di buat full day dengan menggabungkan kajian *ngaos* kitab. Dalam mendidik dan mengajarkan kepada santri tidak jauh berbeda dengan pondok lainnya dimana terdapat 3 (tiga) metode yaitu: *hafalan*, *sorogan*, dan *bandongan*. Selain 3 (tiga) hal tadi di Al-Iman sendiri juga terdapat metode *muqarranah*, *bahtsul masaail*, dan diskusi.

c) Kegiatan PP. Al-Iman Bulus

Kegiatan pondok yang wajib diikuti oleh semua santri Pondok Pesantren Al-Iman yaitu:

1. Sholat jamaah dan wirid
2. Mengaji Al-qur'an
3. Kelas intensif (diniyah)
4. Kajian Kitab
5. *Dibaiyah & Simtud Duror*
6. Khitobah
7. *Ro'an*

3. Profil KHRS. Hasan Agil Ba'bud

Nama asli beliau adalah Hasan Basri namun karena nama ayah dari beliau Agil maka ditambahkan sehingga menjadi Hasan Agil, KHRS. Hasan Agil Ba'bud. Beliau lahir di Bulus pada 08 April tahun 1958. Beliau merupakan putra dari Sayyid Agil Ba'bud dan Syarifah Salmah As-Segaf. Wan Hasan merupakan putra ke-empat dari lima bersaudara yaitu (1) Sayyid Muhammad (Surabaya) (2) Syarifah Nukmah (Almh) (3) Sayyid Alwi (Kudus) (4) Sayyid Hasan (5) Syarifah Anisah (Purworejo). Istri beliau bernama Syarifah Aisyah Ba'bud dari Cirebon. Dari pernikahannya dengan Syarifah Aisyah, beliau memiliki putraputri yaitu:

- 1) Syarifah Sofia Aqila Ba'bud
- 2) Abdurahman Ba'bud
- 3) Faqih Muqoddam Ba'bud
- 4) Syarifah Robiah Adwiyah Ba'bud
- 5) Bahaudin Soesrosumpeno Ba'bud
- 6) Syarifah Maryam Maharani Ba'bud

KHRS. Hasan Agil Ba'bud merupakan salah satu ulama mashur di Kabupaten Purworejo, masyarakat di Kabupaten Purworejo ini lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Wan Hasan. Sedangkan untuk kalangan masyarakat Bulus dan juga santri Al-Iman Bulus, beliau lebih akrab dengan sapaan Ustadz Hasan.

Seperti halnya dengan ulama-ulama lainnya, beliau Wan Hasan saat remaja menghabiskan waktunya untuk belajar di pesantren. Beliau sebelum melanjutkan belajar di pondok pesantren, terlebih dahulu beliau mengaji bersama dengan ayahnya yaitu Sayyid Agil. Setelah itu, beliau melanjutkan belajar ke pondok pesantren untuk lebih mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman. Diantaranya beliau Wan Hasan belajar ngaji dan mondok di Pesantren Tremas Pacitan dan di Pondok Pesantren Bathokan Kediri yaitu kepada KH. Jamal.

BAB IV

Analisis Peran Ulama Dalam Politik Elektoral/Pilkada 2020

Di Kabupaten Purworejo

Setelah memaparkan terkait Nahdlatul Ulama, hakikat ulama, teori karismatik leader, dan konsep peran. Pada bab ini akan dibahas mengenai peran ulama dalam proses politik khususnya pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purworejo. Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada salah satu ulama karismatik Purworejo KHRS. Hasan Agil Ba'bud yang mana beliau merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama di Purworejo. Seperti yang kita ketahui bahwa Nahdlatul ulama merupakan salah satu ormas agama yang besar selain memiliki pengikut yang banyak, ormas keagamaan ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam proses menentukan kebijakan nasional maupun daerah.

Dalam pembahasan bab ini, penulis mengulas tentang sikap dan perilaku serta peranan ulama NU yaitu KHRS. Hasan Agil Ba'bud dalam kancah perpolitikan (Pilkada 2020) di Purworejo. Adanya sikap ulama dalam politik inilah yang menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya warga *nahdliyin*, dimana yang kita tahu bahwa kekhasan warga *nahdliyin* dalam berpolitik adalah *nderek kyai* sehingga kiranya sikap dan perilaku seorang ulama menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan politik kedepannya. Tak hanya itu, ketika seorang ulama telah *dawuh* dan memiliki kecenderungan terhadap politisi tertentu, maka tanpa berfikir dua kali para pengikut akan mendengarkan *dawuh* tersebut dan mengikuti pilihan kyainya. Tidak dikatakan bahwa 100% masyarakat akan selalu mengikuti *dawuh* kyai secara penuh, hanya saja penulis memberikan pengertian bahwa tidak dapat dipungkiri apa yang menjadi pilihan seorang ulama pasti akan menjadi referensi tersendiri bagi masyarakat apalagi pengikutnya. Dan sikap atau pun perilaku yang berasal dari seorang ulama akan menjadi contoh/tolak ukur bagi masyarakat pula.

Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purworejo ini cukup menarik untuk dikaji, dalam pilkada tersebut terdapat tiga (3) calon pasangan bupati dan wakil bupati. Pasangan calon yang menyita perhatian adalah pasangan calon No. 2 dan 3 yaitu H. Kuswanto-Kusnomo dan R.H. Agus Bastian, S.E,M.M- Hj. Yuli Hastuti, S.H. dengan persentase jumlah suara yaitu 35,0 % (Kuswanto-Kusnomo) dan 36,4 % (Agus Bastian-Yuli Hastuti). Kedua pasangan ini sangat menarik karena menjadi dua pilihan yang cukup berat bagi warga *nahdliyin* khususnya, bagaimana tidak pasalnya warga *nahdliyin* di suguhkan oleh dua pilihan yang mana mendapatkan dukungan dari ulama-ulama NU. Beberapa ulama menyampaikan dukungan baik langsung maupun tidak terhadap pasangan Agus Bastian-

Yuli pun demikian dengan pasangan Kuswanto-Kusmono beberapa ulama NU lainnya juga menyampaikan dukungannya. Sehingga pada Pilkada kali ini dapat dikatakan NU terbelah antara memilih untuk mengikuti ulama yang mendukung Agus Bastian-Yuli atau Kuswanto-Kusmono.

Telah disampaikan bahwa terdapat pasangan calon yang keduanya memiliki pendukung yang cukup kuat. Penulis menyampaikan dengan menggunakan kata mendukung, hal ini karena secara struktural organisasi ini (Nahdlatul Ulama) tidak menggiring anggotanya untuk memilih salah satu pasangan, sepenuhnya pilihan di serahkan kepada masing—masing individu. Sehingga terjadilah adanya dua belah pihak, warga Nu tidak satu suara dalam memilih calon pemimpin. Tetapi menjadi menarik, masyarakat menjadi seperti dua kubu antara mengikuti ulama pendukung Agus Bastian-Yuli dengan ulama yang cenderung kepada pasangan Kuswanto-Kusmono.

A. Ulama (NU) dalam Politik Electoral/ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo

Peran ulama pada dasarnya sudah sangat melekat sejak dulu, dalam proses merebut kemerdekaan Negara Indonesia tak lepas dari peran ulama sehingga tidak dapat dipungkiri sejak dulu ulama telah memiliki eksistensi penting. Wilayah Indonesia sendiri yang merupakan mayoritas masyarakat beragama islam semakin menjadikan peran ulama lebih luas, bahkan tidak hanya perihal agama saja melainkan dalam bidang lainnya seperti sosial, ekonomi, bahkan sampai pada ranah politik. Ulama menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai hal, inilah yang semakin membuat sosok ulama sangat diperhitungkan.

Kajian tentang ulama dalam dunia politik bukanlah fenomena baru. Sejak masa orde baru ulama sudah memiliki peran yang penting dalam kancah politik, pasalnya ulama memiliki peran yang penting dalam hal melegitimasi aturan hukum dan juga kebijakan politik, ulama digunakan sebagai stempel legitimasi tersebut. Hal inilah yang lebih cocok, dimana posisi ulama menjadi *agen of control* dalam kebijakan serta hukum yang diberlakukan. Namun, apakah pada masa sekarang ini peran ulama masih sama seperti dulu atau bahkan lebih dalam lagi.

Ulama yang memiliki peran besar dalam hal pendidikan, sesungguhnya juga memiliki peran sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat secara umum. Seperti yang telah penulis singgung diatas, bahwa ulama memiliki peran dalam proses kemerdekaan Indonesia melawan penjajah kolonial. Ulama dengan gagah menjadi salah satu garda

depan untuk melepas masyarakat dari belenggu penjajahan. Sehingga setelah Indonesia merdeka pun peran ulama masih sangat penting dan tidak dapat diremehkan. Seperti yang disebutkan pada teori Cliffordz Geetz tentang peran ulama salah satunya *agen of control* dalam mendorong berlakunya sebuah perubahan yang terstruktur dan terarah dalam mentransformasikan berbagai masalah baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dsb.²⁷ Hal inilah mengapa peran sosok ulama menjadi beragam dan cenderung kompleks terlebih dalam kalangan warga Nahdlatul Ulama, ulama menjadi ikon penting dalam struktur kemasyarakatan bahkan sampai pada tingkat berbangsa dan bernegara ulama menjadi figur teladan besar bagi masyarakat secara umum.

Politik tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini kita mengenal bahwa politik terdapat dua (2) macam yaitu (1) Politik Kebangsaan (teori) dan (2) Politik Praktis (kekuasaan) keduanya sama-sama menghadirkan nuansanya sendiri. Politik kebangsaan merupakan bentuk dari menjaga dan bertanggungjawab kepada bangsa dan juga Negara dalam menjaga kestabilan perpolitikan di Negara Indonesia.

Ulama secara umum sudah tidak lagi asing terhadap dua hal tersebut baik politik praktis maupun politik secara teori. Hal ini disampaikan oleh KH MA Sahal Mahfudh bahwa dalam khazanah keilmuan islam pun mempelajari tentang politik dalam kitab-kitab *Fiqih siyasah*. KH. Sahal Mahfudz menyampaikan bahwa NU sendiri mengenal terdapat tiga (3) paradigam politik yaitu politik kenegaraan, kerakyatan, dan yang terakhir kekuasaan. Beliau juga menyampaikan bahwa politik kekuasaan (praktis) menempati pada kategori paling rendah. Dan para ulama seharusnya menjalankan politik sebagai penguat bangsa Indonesia serta mengedepankan keadilan sosial dan kerakyatan, bahkan beliau menambahkan adanya etika politik. KH MA Sahal Mahfudh juga menambahkan bahwa politik praktis merupakan porsi partai politik yang lebih pada tujuan kekuasaan yang pastinya melibatkan warga Negara, tak luput pula serta warga NU secara perorangan. Berikut wawancara dengan KH. Hasan Agil Ba'abud:

“Berpolitik, orang itu pasti ada dalam hidupnya itu melakukan politik. Lah apa, dalam islam itu politik disebut siyasah to, kalo zaman sekarang tidak menggunakan siyasah itu malah bisa terjebak sendiri. Kita butuh itu, berp politik setiap harinya paham to maksudnya. Nah kalo politik yang seperti Pilkada ya monggolah ada siasat pasti to bagaimana endingnya

²⁷ Wakhudin,. *Tarmizi Taher Jembatan Umat, Ulama, dan Umara*. (Bandung: Ganesa, 1998 h 111)

tujuannya itu apa, kekuasaan memang tapi kekuasaan yang harapane pasti untuk kebaikan umat, kesejahteraan masyarakat, kalo bisa kan begitu. Orang-orang itu banyak yang ikut politik tapi ndak paham apa itu sejatinya bagaimana permainannya. Perlu diperhatikan lagi itu,” (wawancara, 12 Februari 2021)

Hal ini juga dipertegas oleh KH Farid dalam wawancara, sebagai berikut:

“Sebagai ulama harus memiliki pandangan yang luas. Politik misalnya ya sebisa mungkin bisa membaaur, nah sebagai ulama harus itu tahu berpolitik, ya harus masuk dalam politik kebangsaan gitu. Misal kok ikut politik praktis bagaimana yo ndak papa itu hak mereka. Tetapi saya pertegas bahwa kalo NU ini kalo Purworejo ya ndak tau saya kalo lain bagaimana, secara lembaga ndak masuk dalam politik praktis itu jangan sampe kalo bisa tapi kalo perorangan ya monggo lagi-lagi itu adalah hak. Kalo untuk Wan Hasan memang tidak yang menggebu-gebu dalam berpolitik, beliau ulama yang nasionalis, tidak fanatic sekali dan juga bukan yang tak acuh terhadap politik.”(wawancara pada KH Farid, 04 Januari 2021)

Ulama dalam memandang politik pastinya berbeda-beda antara ulama satu dengan lainnya. Bagaimana ulama terlibat didalamnya juga ulama satu dengan lainnya berbeda. Dalam hal ini KH. Hasan Agil yang merupakan salah satu ulama karismatik di Kabupaten Purworejo, beliau tidak secara langsung terjun dalam dunia politik tetapi beliau masuk dalam kategori ulama yang masuk dalam politik kebangsaan, artinya beliau acuh terhadap isu-isu politik yang ada sebab pada hakikatnya berpolitik itu merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan oleh K. Yusuf Sholih dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalo Wan Hasan ya, gini gampangane pada pemilu dulu. Wan Hasan ndak secara langsung terjun politik. Tapi beliau bukan berarti ndak mau tau perihal politik, ulama kan sebagai apa ya, ya menjadi panutan jadi secara umum ya masuklah dalam politik dengan cara beliau sendiri, jika berbicara politik pasti ada tindakan dan tindakan itu tujuan utamanya untuk kesejahteraan umat.”(wawancara dengan K. Yusuf Sholih, 21 Januari 2021)

Politik kebangsaan yang telah disampaikan diatas dimana ulama memang harus ada didalamnya sebagai wujud cinta serta tanggungjawab atas kesetabilan politik di Negara, namun hal ini bukan berarti ulama tak menghiraukan adanya politik praktis. Pada pilkada ini misalnya, ulama tidak dapat hanya berpangku tangan melihat hiruknya pilkada. Hanya saja ulama memiliki tempatnya sendiri dalam bergerak, pilkada merupakan salah satu instrument demokrasi tergolong dalam pesta rakyat dimana rakyat menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Sehingga ulama dengan porsinya ikut mendampingi masyarakat dalam *ikhtiar* nya memilih pemimpin mereka. Karena tidak semua masyarakat mau untuk melihat kapabilitas dari masing-masing pasangan calon, tidak terkecuali untuk warga *nahdliyin* tidak semuanya juga paham sehingga dengan kekhasan yang dimiliki oleh orang-orang NU yang notabennya lebih kepada *nderek kyai* akan melihat ulamanya memilih siapa untuk dijadikan acuan. Berikut wawancara dengan KH. Hamid:

“Ulama sebenarnya ga wajib mba turun atau terlibat dalam politik seperti itu. Tapi harus, maksudnya apa ya gini lah porsi ulama sudah ada sendiri. Ulama memang sedikit lah khususnya di Purworejo ini yang terlibat langsung dalam politik praktis tetapi bukan berarti lepas tangan. Ulama hadir dengan porsinya sendiri. Nah terkait bagaimananya kan itu kembali pada ulama masing-masing. Secara mudahnya gini lah, ulama ndak mungkin lepas tangan tapi ya tidak terus koar-koar begitu milih siapa, mereka punya porsinya masing-masing antar ulama pun begitu. Kalo Yai Hasan beliau itu secara umum ini sangat terbuka, beliau pasti punya kecenderunga berpolitik tapi tidak yang fanatisme. Biasa saja.”(wawancara dengan KH Hamid, 08 Januari 2021)

Pandangan ulama terhadap politik memang beragam tidak dapat disama ratakan antara ulama satu dengan lainnya, seperti yang telah disampaikan diatas bahwasannya setiap orang pasti melakukan praktik politik sebab pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari berpolitik hanya saja bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan itu berbeda-beda. Seperti yang penulis maksudkan politik, dalam hal ini Pilkada sebagai masyarakat yang cerdas pastinya tidak menghiraukan begitu saja adanya Pilkada ini, yang mana pilkada merupakan bagian dari politik itu sendiri tetapi semua ada porsinya. Baik ulama maupun masyarakat pada umumnya memiliki ranahnya masing-masing

perannya pada pilkada, harapan baru tentunya dengan dilaksanakan pemilihan kepala daerah ini. Berpolitik dengan baik serta sesuai dengan prosedur dan mengetahui posisi serta porsi masing-masing dapat menjadi bagian dari menjalankan politik kebangsaan itu sendiri.

B. Sikap Ulama (NU) Terhadap Politik Elektoral/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Di Kabupaten Purworejo

Ulama dalam masyarakat Purworejo merupakan sosok yang sangat diagungkan dan sebagai figur yang menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat baik itu mengenai dalam perilaku sehari-hari, agama sampai dengan kebijakan-kebijakan sosial, bahkan politik. Apalagi sebagai warga NU yang mana mereka memiliki budaya tersendiri dalam bersikap pada ulama. Seperti pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini, figur ulama NU menjadi sorotan para politisi. Ulama masuk dalam agenda para politisi dalam masa Pilkada, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa sosok ulama memiliki peran strategis dalam pilkada baik sebagai sosok orang tua, guru, atau sebagainya yang berarti para politisi sangat memperhitungkan posisi ulama. Seperti yang disampaikan oleh bapak Umar sebagai berikut:

“Kami ya melakukan beberapa kunjungan pada sesepuh dan kyai-kyai di Purworejo ini, ya hampir semua. Intinya minta do’a restu karena bagaimana pun do’a itu sangat penting. Jadi kami agendakan memang untuk sowan-sowan begitu, meminta doa supaya segalanya dilancarkan, begitu si.” (dalam pada 20 Januari 2021)

Dalam kontestasi Pilkada, ulama menjadi target para politisi dalam kiprahnya mencalonkan diri sebagai bupati ataupun wakil bupati. Ulama dianggap dapat menjadi salah satu jalan para politisi untuk mendapatkan simpati masa, posisi inilah yang pastinya sangat diharapkan oleh kontestan pilkada. Dengan mendapatkan banyak simpati masa, akan menjadi jalan untuk mendapatkan suara banyak dan kemenangan tentunya.

KH. Hasan Agil merupakan sosok ulama yang memiliki karisma tinggi serta peran penting khususnya di Kabupaten Purworejo. Demisioner Rais Syuriah ini selain sebagai panutan serta rujukan bagi santri-santrinya juga menjadi sosok panutan bagi masyarakat

secara umum, bahkan tidak jarang menjadi tempat “curhat” bagi para aktivis organisasi Nu seperti IPNU, IPPNU, Fatayat dll beliau menjadi sosok orangtua dan guru sekaligus yang mengayomi dan memberikan solusi dengan porsinya. Pada Pilkada ini misalnya, beliau di sowani oleh para politisi serta kontestan calon bupati dan wakil bupati. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda dalam berkunjung ke tempat beliau. Berikut wawancara dengan K Yusuf Sholih:

“Pada saat itu memang semua sowan ke beliau, jadi ketiga-tiganya ya sowan pastinya dengan waktu dan cara yang beda-beda. Tapi intinya sama minta do’a restu bahkan mungkin dukungan. Beliau ya saya tahulah beliau itu siapa (milih siapa) tapi ya kalau ketiganya sowan itu, ya diterima semua ndak beda-beda lah wong minta do’a, kyai ya mendo’akan to.” (wawancara, 21 Januari 2021)

Memang sudah menjadi hal yang lazim, ketika dalam kontestasi pemilihan seperti ini melibatkan ulama didalamnya. Para politisi memanfaatkan posisi strategis ulama yang memiliki banyak pengikut dengan harapan dapat menarik banyak suara masyarakat. figur ulama tidak dapat dianggap kecil, karena setiap perkataan yang keluar dari seorang ulama akan ditangkap sebagai *dawuh* (anjuran) oleh pengikutnya. Sikap dan tindakan ulama sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam geraknya ulama memang harus berhati-hati dan teliti agar masyarakat pengikutnya juga tak salah dalam mengambil sikapnya.

Tarmizi Taher berpendapat bahwa dalam kehidupan seorang ulama memiliki tugas yang sudah semestinya dijalankan yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Menjadi sosok panutan dan penuntun akhlak
2. Mengembangkan metode pendidikan agama islam
3. Tidak lupa akan amanah “pewaris nabi” yaitu *amar al-ma’ruf nahyu ani al-munkar* (memerintahkan hal baik, dan mencegah hal tidak baik)
4. Tidak mudah bosan untuk selalu mengingatkan masyarakat yang sering hanyut dan lupa yang membuat mereka menyimpang dari ajaran moral dan etika
5. Selalu arif dan bijaksana dalam berkomunikasi baik secara modern maupun tradisional.

²⁸ Wakhudin,. *Tarmizi Taher Jembatan Umat, Ulama, dan Umara. (Bandung: Ganesa, 1998)*

Berdasarkan pendapat diatas dimana telah disebutkan, Ulama yang merupakan sosok sakral dalam struktur sosial di masyarakat menjadi figur serta teladan bagi para pengikutnya. Dalam menyikapi serta menanggapi isu-isu pilkada haruslah bijaksana. Seperti yang dilakukan oleh KH. Hasan Agil, sebagai ulama berpengaruh sudah pasti akan menjadi sorotan. Pada Pilkada ini, beliau didatangi oleh ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ketiga calon pasangan bupati dan wakil bupati ini sowan untuk meminta do'a restu dan dukungan kepada Wan Hasan. Berikut wawancara dengan beliau:

“ketiganya datang semua tanpa terkecuali, ya Agusbastian, Agustinur, dan juga Kuswanto semua datang. Tim sukses juga datang, ngobrol minta do'a restu, foto-foto juga, ya bagaimanapun tetap semua di do'akan. Semua punya kelebihan dan kurangnya masing-masing to. Siapapun yang datang yo tak sambut. Ngobrol aja biasa itu orang-orang partai kesini, beberapa juga ada yang saya paham tim sukses paslon dua.” (wawancara, 12 Februari 2021)

Berikut KH Hamid menambahkan:

“Memang tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati semua sowan ke beliau. Mestinya kan minta do'a to minta do'a restu mau kompetisi minta dukungan juga. Saya tahu Wan Hasan milih siapa tapi ya karena kyai bagaimana pun ga mungkin kok nolak disowani. Semua diterima di do'akan.”(wawancara, 08 Januari 2021)

Dengan fenomena yang terjadi, dimana ulama menjadi tempat untuk menyampaikan hal yang bersifat pribadi seperti minta do'a agar dilancarkan sebuah usaha, atau seperti yang sedang terjadi meminta do'a supaya sukses dalam pemilihan. Mereka mendatangi/sowan ulama dan meneritakan apa yang memang dikehendaki. Sebagai ulama yang mengayomi, pasti akan memberikan do'a dan juga nasihat-nasihat membangun serta arahan untuk kedepannya untuk siapapun yang memang dating meminta do'a restu. Hal ini bisa saja masuk dalam kategori peran ulama dalam Clifford Geertz yang salah satunya ialah sebagai *problem solver* atau penyelesaian masalah baik sosial atau lainnya, secara langsung ulama pasti memberikan nasihat dan petunjuk demi kebaikan untuk kedepannya.

C. Peran KHRS. Hasan Agil Ba'abud dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo.

Ulama karismatik dengan segala *dawuh* membangun yang selalu dinantikan pengikutnya. KHRS. Hasan Agil Ba'abud atau biasa disapa dengan Wan Hasan merupakan salah satu ulama berpengaruh di Kabupaten Purworejo, pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman ini juga merupakan tokoh sesepuh NU di Purworejo. Perangai beliau ketika *ngendika*/berbicara sangat terbuka dan apa adanya, artinya ketika berbicara beliau selalu menyampaikan apapun kebenarannya dihadapannya. Sosok guru dan juga orang tua bagi para santri dan masyarakat pada umumnya. Beliau tidak secara langsung menjadi aktor politik, tetapi menjadi sosok penting yang perlu untuk andil dalam dunia perpolitikan sesuai dengan porsinya.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini Wan Hasan memang secara terbuka memberikan dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu, kendati demikian beliau juga mendukung dan menghargai calon pasangan bupati dan wakil bupati lainnya. Peralnya ketika para politisi atau calon pasangan bupati dan wakil bupati datang/*sowan*, beliau menerima dengan baik bahkan juga mendo'akan serta memberi restu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan serta do'a orang tua/guru pada anaknya. Berikut wawancara dengan beliau KH. Hasan Agil Ba'abud:

“Saya ya tidak nemen-nemen lah, biasa saja. Saya memilih, punya pilihan ya karena itu hak pribadi saja. Masalah siapa nanti yang jadi ya silahkan, harapane yo apik to mestine.”(wawancara, 12 Februari 2021)

K.Yusuf Sholih kembali menambahkan:

“Beliau secara pribadi memang punya pilihan sendiri pasangan nomor dua, sampean tahu lah. Tapi sebagai guru ya ketika murid datang ya disambut minta do'a ya di do'akan begitu semua datang ya ngobrol baik-baik semua sama beliau.”(wawancara, 21 Januari 2020)

Wan Hasan bukanlah satu-satunya ulama yang terbuka menyampaikan sikap siapa pilihan yang dikehendaki pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini. Beberapa ulama pun menyampaikan dukungannya pada pasangan calon tertentu, seperti KH.

Chalwani yang memiliki kecenderungan yang sama dengan pilihan Wan Hasan. Ulama lain seperti Gus Hakim yang juga memiliki pilihan kepada pasangan calon tertentu. dan juga Mbah Kyai Thoifur yang menjadi salah satu ulama yang mendukung pasangan calon namun sedikit terdapat selisih pendapat, pasalnya dilapangan terdapat dua pendapat yang menyatakan beliau mendukung pasangan calon A dan sebagian pun menyampaikan bahwa beliau merupakan ulama yang mendukung pasangan calon B. hal inilah yang menjadi sedikit kurang elok ketika nama ulama, sosoknya menjadi dijual sebagai pendorong suara saja. Pada dasarnya ketika seorang ulama menyampaikan pilihannya terhadap pasangan calon tertentu merupakan hal yang wajar dan itu merupakan hak pribadi. Namun adanya fenomena yang demikian kiranya nama ulama dipakai sebagai pendorong suara masa menjadi sebuah perhatian sangat penting sebagai bagian dari etika berpolitik. Walaupun pada kenyataannya memang hal demikian terjadi, bahwa ulama hanya menjadi symbol bahwa politisi tersebut *nderek* ulama atau manut ulama dengan begitu akan menarik simpati masa untuk memilihnya. Hal ini juga di sampaikan oleh beliau KH. Hasan Agil Ba'abud:

“ya dikatakan saya, semua itu sowan kesini minta do’a restu ya saya do’akan poto-poto juga biasa begitu. Nanti ngerti-ngerti wis ada gambar kulo di template-template begitu gambar e Kyai Chalwani, Kyai Thoifur di template juga yo biasa begitu. Bahkan gambar saya dengan agustinus yo ada padahal Agustinus itu orang nasrani. Banyaklah begiktu, tapi ya saya sampaikan semua baik tapi pastik ada yang terbaik, gimana lah masyarakat monggo.” (wawancara, 12 Februari 2021)

Wan Hasan sangat menyadari dalam masa-masa pilkada seperti ini sangat banyak yang datang dan menyampaikan maksudnya. Beliau secara umum menerima baik semua tamu yang datang baik dari pasangan calon secara langsung maupun tim sukses dan juga partai pengusung masing-masing calon. Bahkan beliau juga terkadang tidak tahu bahwa di berbagai daerah atau pun di jalan sudah di pasang foto beliau dengan pasangan calon tertentu sudah di pasang dan di sebar luaskan. Beliau secara pribadi tidak terlalu memikirkan hal tersebut, beliau tetap berharap masyarakat dapat memilih sesuai dengan kehendak masyarakat sendiri, memilih yang terbaik dari yang baik.

Gambar 1.3



(Sumber: Whatsaap Grup Tim sukses Paslon, 03 Oktober 2020)

Adapun beberapa bentuk tindakan atau sikap dari KHRS. Hasan Agil Ba'bud dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Dukungan Kepada Pasangan calon 02 Kuswanto-Kusnomo

Wan Hasan adalah salah satu ulama dari ulama-ulama yang juga memberikan dukungan terhadap pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati. Wan Hasan dan juga KH. Chalwani dalam Pilkada 2020 ini memiliki pilihan yang sama yakni pasangan calon 02 Kuswanto-Kusnomo. Namun demikian, hal ini sama sekali tidak membuat para ulama ini saling berselisih. Sangat di sadari bahwa pastinya para ulama memiliki pandangan serta pilihan yang berbeda sehingga mereka saling memahami pilihan masing-masing, walaupun dalam pilihan kandidat bupati dan wakil bupati terdapat perbedaan namun tidak dengan perkara lain. Berikut Wan Hasan menyampaikan:

“ Soal pilihan itu relatif, menurut saya ini yang paling benar lain lagi menurut orang lain. Tapi satu hal yang pasti itu siapapun nanti yang jadi bisa mengayomi semua baik yang mendukung maupun tidak karena nantinya juga siapapun yang jadi ya itu yang harus di patuhi. Kalo pada saat pemilihan kok beda pandangan yo wajar. Politik ya seperti itu, ga harus kok pilihan kita sek mesti dadi. Harapane nanti yang jadi bisa

merangkul semua tidak membedakan.”(wawancara dengan beliau Wan Hasan, 12 Februari 2021)

2. Kampanye

Kampanye merupakan salah satu upaya yang secara tersruktur telah diagendakan oleh suatu kelompok yang mana memiliki sebuah tujuan mengajak sasaran target agar mau mendengar serta melakukan sesuai dengan yang disampaikan. Menggiring sikap dan perilaku individu lain agar mau menerima apa yang disampaikan, hal seperti ini tidaklah mudah sebab meyakinkan seseorang agar mau mengikuti sesuai dengan apa yang telah disampaikan.²⁹

KHRS. Hasan Agil memang tidak melakukan kampanye secara terbuka layaknya sebagai tim sukses pasangan calon secara luas, beliau menyampaikan dukungan dalam bentuk mengajak lebih kepada masyarakat kalangannya sendiri. Walaupun demikian, masyarakat luas pun khususnya warga NU mengetahui hal tersebut yang mana Wan Hasan memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut. Beliau hanya menyampaikan bahwa memilih calon pemimpin yang baik itu wajib dalam artian yang beliau sampaikan mengarah terhadap salah satu pasangan calon. Beliau menyampaikan bahwa semua kandidat pasangan calon memiliki representasi masing-masing yang baik tetapi beliau menyampaikan kembali bahwa ketika dalam sebuah kumpulan terdapat hal yang baik maka juga pasti ada hal yang terbaik dari yang baik, sehingga sebisa mungkin memberikan pilihan pada hal yang paling baik. Berikut yang beliau sampaikan:

“semua pasangan calon memiliki tujuan yang baik, kita ngobrol disini (rumah beliau) visi misi mereka cukup baiklah. Tapi dari Bung Tomo ini yo bagus.” (wawancara dengan Wan Hasan, 12 Februari 2021)

Beliau memberikan dukungan kepada pasangan calon Kuswanto-Kusmono ini memang bukan tanpa alasan, tetapi dalam pandangan beliau Wan Hasan pasangan Kuswanto-Kusmono memiliki potensi yang cukup baik. Perihal kampanye atau dukungan yang beliau sampaikan kepada masyarakat sekitar tidak dengan cara yang pada umumnya dilakukan, tetapi secara isyarat pasti beliau memberikan arahan agar memberikan dukungan terhadap pasangan calon tersebut.

²⁹ Ibnu Hajar. Teori dan Praktek Komunikasi Politik. (Yogyakarta: Genta Press, 2015). h 26

Di luar itu memang para pasangan calon melakukan kampanye secara terstruktur, karena kondisi yang memang sedang pandemi pihak KPU pun memberikan kesempatan para pasangan calon untuk mengkampanyekan diri. Melalui media baik media sosial berupa instagram dan juga media cetak seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan daerah tertentu. seperti yang penulis ketahui bahwa pemasangan pamphlet justru lebih banyak di pasang di daerah yang notabennya pelosok/cukup jauh dari kota Purworejo sendiri. Berikut tambahan dari K. Farid:

“jadi ito mba pamplet-pamflet itu justru lebih banyak di pasang di daerah pelosok. Pada saat saya ada kegiatan ngelantik itu di sana Grabag an, Kaligesing cukup banyak itu pamfletnya. Ada fotonya Yai Chalwani, Yai Thoifur, dan Wan Hasan. Mungkin itu strategi, wong ga semua orang mau to liat media. Kadang mereka malah ndak ngerti candidate siapa saja. Paling kalo orang tua sering itu di doktrin milih sek gambar iki wae (tanpa tahu apa sebenarnya yang dipilih) ya di sini atau mungkin di Indonesia masih seperti itu, orang tua itu sama sekali ndak tahu sopo sek meh di pilih ngandelke manut.” (wawancara dengan K. Farid, 04 Januari 2021)

3. Hadir dalam Acara Do'a Bersama di rumah pemenangan pasangan calon

Pada masa pendaftaran calon pasangan bupati dan wakil bupati No. 2 Kuswanto-Kusmono pada 04 September 2020, beliau Wan Hasan memang terlihat hadir di rumah pemenangan pasangan calon di Jalan Brigjen Katamsno No. 39 Pangerejo. Dalam acara tersebut beliau juga sempat memimpin do'au untuk kelancaran pendaftaran. Wan Hasan memang menyatakan dukungannya secara terbuka kepada pasangan calon tersebut, beliau juga sempat meminta kepada kalangannya untuk memberi dukungan. Namun beliau bukanlah sebagai tim sukses secara structural, tetapi ini merupakan bentuk dari dukungan yang diberikan kepada pasangan calon Kuswanto-Kusmono. Dukungan yang beliau berikan kepada pasangan calon Kuswanto-Kusmono tidak menjadikan adanya jarak dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, karena pada dasarnya beliau Wan Hasan merupakan ulama yang sangat diperlukan nasihat serta petuahnya selain sebagai seorang guru beliau juga menjadi orang tua yang memberikan dorongan/motivasi seperti pesan dan arahan ketika nantinya mendapat kesempatan mengemban amanah memimpin daerah Kabupaten Purworejo siapapun itu.

Gambar 1.4



(Wan Hasan hadir dalam acara do'a bersama pendaftaran pada pasangan calon Kuswanto-Kusnomo (2), sumber: Hery Priyantono)

Keterlibatan ulama dalam berpolitik memang sangatlah beragam, setiap ulama memiliki caranya sendiri dalam bersikap dan juga bertindak tak ubah dalam berpolitik. Ulama menjadi bagian penting dalam dunia perpolitikan pastinya dengan tujuan yang mana tujuan itu untuk kepentingan umat, sedangkan cara setiap ulama satu dengan yang lain memiliki khasnya tersendiri. Wan Hasan merupakan salah satu ulama yang memiliki pandangan berbeda dengan ulama lain tentunya, beliau tidak fanatik dengan partai politik tertentu dalam arena kontestasi electoral dalam hal ini beliau lebih kepada siapa yang aktor yang memerankan kontestasi pilihan. Berikut wawancara dengan K. Yusuf Sholih:

“Beliau itu ya ada lah kita begini ada dua partai to sek koyo jelas isine wong NU koyo PKB dan PPP tapi tidak mustahil dipartai lain pun ada orang-orang NU. Nah nek beliau itu, ndak selalu memandang partainya tapi sopo sek nek njerone. Ketika dirasa sreg mantep insya Allah iso nygayomi ya dipilih.”(wawancara,21 Januari 2021)

4. Mengajak Banom Memilih Pasangan 02 Kuswanto-Kusnomo

Seperti yang telah dibahas diatas, bahwa memang secara terbuka Wan Hasan mendukung pasangan calon tertentu dari tiga pasangan calon yang menjadi kandidat bupati dan wakil bupati Purworejo. Tetapi dilapangan beliau memang tidak terjun atau dikatakan sebagai tim sukses, peran yang beliau mainkan lebih kepada sebagai orang pendukung saja, memberikan dukungan layaknya seperti masyarakat pada umumnya. Beliau memang mengajak kalangannya untuk mendukung pasangan tersebut, hal ini di sampaikan beliau pada saat acara do'a bersama di rumah pemenangan Bung Tomo (Kuswanto-Kusnomo), namun tidak menjadikan masalah ketika memang mereka memiliki pilihannya sendiri. Sebatas mengajak dan menyampaikan dukungan beliau terhadap pasangan calon tersebut, tetapi setiap keputusan pilihan merupakan hak individu yang melekat. Sehingga tidak menuntut dan mengharuskan santri maupun pengikutnya untuk serentak memilih yang beliau pilih.

Peran ulama memang sangat beragam sekali, pergantian zaman membawa pada ulama yang semakin memiliki peran ganda. Budaya maupun kemajuan-kemajuan dunia terus terjadi. Tak terkecuali dengan manusia, semakin hari semakin memiliki pemikiran yang lebih luas. Mengingat penulis mengambil pemikiran Cliffordz Geetz yang menyebutkan bahwa seorang ulama memiliki peran yaitu sebagai *cultural bloker* (perantara budaya) dimana terdapat peran-peran penting seorang ulama. Penulis mengambil pemikiran Clifordz Geetz yang menyebutkan demikian dengan maksud bahwa ulama memiliki peran sebagai; pengajar perihal ilmu agama, ulama sebagai *problem solver* yaitu sebagai penengah terhadap permasalahan sosial, ulama sebagai *agen of control* perkembangan serta kemajuan yang ada.

Dalam literasi lain dimana Dhofier yang juga mengkaji terkait ulama memberikan tambahan bahwa sebuah pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan belajar agama, tetapi sebuah pesantren memiliki pendidikan yang lebih dari itu baik tentang masalah sosial maupun ekonomi bahkan hidup bermasyarakat diajarkan dalam dunia pesantren. Dalam hal berpolitik misalkan, pada dasarnya didalam dunia pesantren tetap tidak dapat lepas dari politik. Walaupun disebutkan dalam penelitian Dholfier bahwa

di dalam pesantren yang biasanya terjadi ialah sebuah proses satu arah,³⁰ dimana seorang kyai sebagai sumber pertama dan setiap *dawuh* yang keluar merupakan perintah bagi santri atau pengikutnya.

Keterlibatan ulama dalam dinamika politik tidak dapat disalahkan pun tidak dapat dibenarkan seutuhnya, segala sesuatunya melihat konteks serta kadarnya. Apa dan bagaimana tujuan ulama dalam melibatkan diri dalam politik itu sendiri. Dalam bertindak ulama pasti memiliki pertimbangan yang matang. Seorang ulama tidak akan melakukan sesuatu yang hanya memberikan keuntungan secara pribadi, ulama memiliki umat dan santri. Setiap tindakan yang dilakukan ulama sangat memberikan pengaruh pada mereka. Sehingga menjadi pertimbangan yang matang, bagaimana diri seorang ulama melibatkan dalam dinamika politik. Manfaat dan *madharat* apa yang akan didapatkan, yang tentunya akan memberi dampak bagi umatnya secara umum.

Dalam beberapa literasi pun terdapat argumentasi yang membenarkan serta menegaskan adanya keterlibatan seorang ulama dalam berpolitik merupakan sesuatu yang sangat wajar baik ulama tersebut turun langsung sebagai aktor politik yang mencalonkan dirinya dalam kontestasi pemilihan, tim sukses atau pun sebagai pendukung pada dasarnya hal inik sah saja, karena berpolitik merupakan hak dari setiap warga Negara tanpa peduli apa profesi yang mereka miliki. Justru ketika keterlibatan ulama dipandang sebagai sebuah kesalahan akan sangat rancu karena akan merusak tatanan demokrasi yang ada sesuai dengan UUD 1945. Wan Hasan memang tidak secara langsung terlibat dalam politik dalam ini pilkada sebagai aktor politik, namun beliau memberikan penjelasan bahwa seorang ulama pun perlu untuk tahu apa itu politik dan bagaimana cara kerjanya sebab dengan demikian ulama dapat lebih tepat dalam melangkah. Ulama juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta berpikiran lebih terbuka terhadap isu-isu politik.

Zaman semakin maju ini menjadikan ulama mau tidak mau harus memiliki sikap yang lebih modern. Istilahnya supaya tidak “tergerus zaman”, seorang ulama harus memiliki pola pikir yang luas. Politik sudah menjamah serta menjadi topik besar di Indonesia bahkan dunia, persoalan yang ditimbulkan pun tidak main-main. Bahkan sampai isu-isu agama menjadi bagian dari polemik politik yang terjadi. Karenanya ulama memiliki tempat untuk mengambil peran, ulama dapat menstabilkan polemik yang terjadi, ulama sebagai pereda setiap isu yang digamblangkan, meluruskan apa dan bagaimana seharusnya

³⁰Oleh Dhofier Zamankhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Sebagaimana dikutip oleh M. Hamdan Basyar. *Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional pasca-Orde Baru*. lihat hal 75.(Jakarta,1982)

politik itu dijalankan. Melalui kaca mata pandangan ulama inilah, harapannya politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya ulama dan masyarakat secara hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memilih. Sehingga ketika seseorang memiliki kecenderungan terhadap pasangan calon tertentu merupakan suatu hal yang wajar. Seperti yang telah dikatakan bahwa pada dasarnya hak untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin merupakan suatu hak pribadi itu sendiri. Ketika seorang ulama secara pribadi menunjukkan pilihannya pada salah satu paslon juga sah saja dan itu merupakan sebuah hak. Tetapi ulama yang memang memiliki peranan dan merupakan tokoh panutan, sikap dan tindakannya selalu menjadi sorotan. Disinilah sebenarnya ulama perlu untuk menempatkan dirinya pada porsi yang tepat. Ulama sebagai pemersatu umat, melindungi umat, dan panutan umat dengan demikian kikiranya lebih menjaga muruah ketika dalam kondisi dilapangan ulama bersikap netral.

Posisi strategis ulama dan kiprahnya dalam kehidupan masyarakat menjadi magnet tersendiri bagi para politisi. Dalam fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Purworejo pun tidak lepas dari keterlibatan ulama didalamnya. Penulis memang hanya menfokuskan pada peran KHRS. Hasan Agil dalam Pilkada ini sehingga tidak melebar dengan ulama lainnya. KHRS. Hasan Agil salah satu ulama besar di Purworejo, beliau melibatkan diri dengan mendukung salah satu paslon sebagai hak pribadi. Mengajak kalangannya untuk mendukung pasangan calon Bung Tomo, namun tidak secara terang-terangan mengharuskan pengikutnya untuk memilih pasangan calon yang dikehendaknya. Beliau menyerahkan sepenuhnya hak memilih kepada masyarakat, hanya saja mengarahkan agar dapat memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik.

Bedasarkan beberapa fenomena serta bentuk peran ulama dalam politik yang khususnya pada Pilkada di Kabupaten Purworejo dijelaskan bahwa ulama memiliki karisma serta memiliki otoritas. Dimana ulama memiliki posisi penting dalam perpolitikan di Purworejo, sosoknya mampu membawa simpatisan masa, karenanya dalam kontestasi politisi mendapatkan dukungan. Karisma yang ulama miliki akan dengan sendirinya melahirkan otoritas yang sangat berpengaruh besar didalam masyarakat dan dengan hal tersebut akan muncul ketaatan serta rasa *takdzim* terhadap ulama. Segala tindakan dan ucapan yang disampaikan oleh beliau (KHRS. Hasan Agil) tentunya akan menjadi acuan atau pun referensi bagi umat dan santrinya untuk melakukan sesuatu seperti ulama panutannya. Sehingga memang benar adanya bahwa setiap tindakan dan juga ucapan yang

keluar dari diri seorang ulama merupakan panutan tersendiri bagi para umat dan santri sebagai rujukan.

Dari berbagai analisis yang telah disampaikan diatas, rupanya cukup menjadi perhatian dan keprihatinan ketika peran-peran strategis ulama disalah gunakan atau bahkan dari ulama itu sendiri yang mana sosoknya justru malah bergeser untuk kepentingan sesaat akibat keterlibatannya dalam politik praktis. Dalam fenomena ini ketika terjadi menjadikan gagalnya ulama yang masuk ranah politik sebagai *cultural bloker*. Dimana justru ulama mengarah pada makelar politik, yang dengannya menjadikan suara lebih unggul. Sudah dikatakan diawal kajian bahwa ulama memiliki modal sosial yang cukup tinggi hal ini dapat dipakai sebagai mobilisasi suara masyarakat dimana terdapat tujuan tertentu.

Pada Pilkada ini, terjadi fenomena menarik dimana dalam masa kampanye dan masa-masa pilkada tersebut para politisi sangat ramai menyampaikan kepada masyarakat terkait ulama yang memberikan dukungan. Hal ini sampai pada banyaknya baner atau pun pamflet yang menampilkan gambar pasangan calon dengan ulama-ulama Purworejo. Para politisi selalu menyampaikan adanya dukungan ulama tertentu terhadap pencalonan mereka, tokoh ulama menjadi alat guna mencapai kemenangan dan menggiring suara dari kalangan muslim dalam ini terlebih warga NU, sebab secara perorangan pun banyak sekali konsolidasi pribadi orang-orang Nu terhadap pasangan calon yang mengantongi dukungan dari ulama-ulama pembesar NU Purworejo.

BAB V

Relasi Ulama Dengan Penguasa Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo

Menjalin hubungan dengan siapapun dan juga kapanpun merupakan sebuah hak setiap individu. Tak terkecuali hubungan ulama dengan para penguasa atau pun para politisi. Dengan terjalinnya sebuah hubungan yang baik juga akan membentuk komunikasi yang baik pula. Sehingga dalam jalinan hubungan ini antara ulama dan penguasa dapat saling bertukar informasi mengenai banyak hal khususnya terkait kepemimpinan penguasa dan juga suara masyarakat melalui ulama tersebut. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik antara dua tokoh ini bisa menjadi ruang dalam penentuan kebijakan yang tidak jomplang.

Pada masa-masa pemilihan/Pilkada ini bukan lagi hal yang baru ketika para pasangan calon atau politisi mendekati ulama, menjalin hubungan dekat dengannya. Hal ini juga tidak luput dari mengambil simpatik baik kepada ulama dan juga masyarakatnya, khususnya warga NU. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para pasangan calon untuk menarik simpati warga NU salah satu diantaranya yaitu menunjukkan keikutsertaan/keanggotaannya sebagai orang NU dengan memiliki kartu Nahdlatul Ulama. Pada bab ini penulis akan mengulas terkait relasi antara ulama dengan para penguasa atau politisi khususnya pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo.

A. Relasi Ulama dan Politik

Membahas terkait bagaimana ulama dengan penguasa atau politisi kiranya perlu untuk mengklarifikasi makna ulama itu sendiri. Bagaimana ulama memposisikan diri dalam sebuah arena politik. Peran ulama yang telah disampaikan pada bab sebelumnya memberikan kita gambaran bagaimana ulama menempatkan dirinya dalam sebuah arena politik. Serta tindakan dan juga sikap yang tepat dilakukan seorang ulama dalam kancah perpolitikan.

Dalam bukunya Badruddin Subky menyampaikan bahwa terdapat pengertian ideal terkait ulama yaitu sekelompok orang yang mana dia menguasai ilmu agama, memiliki kemampuan untuk membimbing umat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, menghidupkan sunnah (tingkah/sikap nabi SAW), mampu mengembangkan ajaran ilmu agama islam secara *kaffah* (utuh), serta mampu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Sosok ulama memang diharuskan memiliki sifat yang tak biasa, mereka yang memiliki akhlak

yang luhur, berjiwa besar, memiliki wawasan luas, bisa menjalani ujian, dan memiliki sikap yang kritis/peka terhadap lingkungan sekitar juga peka terhadap perkembangan zaman baik itu sosial, masyarakat, maupun dalam ranah politik.³¹ Seorang ulama memiliki kesan wibawanya sendiri tanpa dibuat-buat yang dengannya menimbulkan rasa *takdzim* (hormat) dalam diri umat secara alami.

Pada masa seperti sekarang ulama yang tidak hanya berurusan dengan masalah keagamaan saja ulama pun memiliki beberapa kategori, dimana ulama dapat digolongkan dalam berbagai jenis; yaitu *cultural* (ulama yang mendedikasikan dirinya dalam hal budaya), intelektual (ulama yang mendedikasikan dirinya dalam hal keilmuan), kemudian politik (ulama yang berdedikasi dalam kancah perpolitikan), dan yang terakhir *futgurolog* (ulama yang dia memiliki profesi sebagai penyembuh/konselor).³² Dalam penelitian ini sendiri, ulama yang dimaksud ialah ulama yang memiliki peranan dalam dunia politik yaitu mereka yang melakukan tindakan serta bersikap atas nama umat dengan harapan ketika masuk dalam dunia politik dapat menjadi benteng serta *agen of control* terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan untuk kepentingan banyak umat. Ulama dipercaya dapat melakukan hal tersebut, melihat juga dari pandangan Clifford geetz yang menyatakan ulama sebagai *cultural bloker*.

Kategori maupun jenis yang telah disampaikan diatas, dalam penelitian ini lebih mengarah pada ulama yang mendedikasikan diri dalam ulama intelektual dan juga *cultural*. Hal demikian ini mengarah pada tujuan islam yang hadir sebagai agama *rahmatat lil 'alamin*. Benarkah tujuan itu masih sama dan murni, setiap tindakan maupun sikap ulama tidak lain untuk memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan umat. Dedikasi ulama dalam dunia politik sangat beragam dan memiliki kekhasan tersendiri. Tak dipungkiri ulama pun memiliki kepentingannya, yaitu kepentingan umatnya.

Ulama berkontribusi dalam dunia politik baik secara langsung menjadi aktor maupun sebagai pendukung, baik melalui organisasi politik/partai politik, atau pun melalui organisasi sosial kemasyarakatan. Hal ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh ulama itu sendiri, dimana mereka mampu memperjuangkan dengan baik dan komitmen pada tujuan mengedepankan kepentingan kemaslahatan umat melalui kekuasaan atau sebagai *agen of social change* dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

³¹ Badruddin Subky. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 153

³² Oleh Ali Ikhwan, dimuat dalam Gatra, No.47 Tahun X, 9 Oktober 2004. Sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Fajri, *Ulama dan Politik (Analisis Fatwa dan Peran Politik MUI Era Reformasi)*, Tangerang: Talenta Pustaka Indonesia, 2004.

Nahdlatul Ulama yang merupakan sebuah organisasi keagamaan besar pada masanya merupakan organisasi yang cukup melekat juga dengan politik. Dalam perkembangannya pun NU sedikit demi sedikit memulai langkahnya dalam dunia politik. NU terlibat dalam masalah-masalah politik pada saat itu berawal dari terbentuknya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), namun tidak berlangsung lama dan pada tahun 1943 digantikan oleh adanya Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia). Setelah kemerdekaan Indonesia, Masyumi menjadi sebuah partai politik dan NU sebagai tulang punggung Masyumi. Karena perbedaan kepentingan antara NU dengan Masyumi sehingga NU keluar dari Masyumi dan secara independen menjadi partai politik bernama NU. Setelah itu, NU mengukir sejarah dalam politik yaitu mendapatkan suara yang besar memperoleh 45 kursi di parlemen, pada pemilu 1971 pun mendapatkan suara yang cukup besar hal ini karena NU sendiri memiliki relasi yang cukup kuat dengan kaum santri serta dukungan besar dari kalangannya. Seiring berjalannya waktu NU memutuskan untuk menjadi organisasi murni keagamaan pada 1983 (hasil Munas ke-86), warga NU masih memiliki solidaritas kuat dalam politik ditunjukkan melalui partai politik PKB yang mayoritas adalah orang NU.' dan tidak terlibat dalam urusan politik yaitu pada pemilu 2014 supaya tidak dijadikan alat untuk pencapaian kepentingan elite politik yang hanya menggunakan solidaritas masa NU.

Ulama yang melibatkan diri dalam politik terkadang dianggap kurang tepat atau dianggap sebagai desakralisasi integritas moral ulama itu sendiri, kita lupa bahwa ulama merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya, ulama merupakan bagian dari *civil society* yang tidak dapat dihilangkan dalam dinamika politik suatu bangsa. Walaupun masih ada pandangan yang mengharuskan ulama sebagai tim oposisi yang mengontrol kebijakan yang ditetapkan. Lalu bagaimanakah posisi ulama yang benar dalam politik. Islam tidak pernah menetapkan pola pemerintahan bagaimana yang harus ada dalam Negara secara sepihak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah kebijakan atau keputusan baiknya dilakukan secara musyawarah yang didalamnya mengutamakan sebuah keadilan, serta kesejahteraan bersama. Namun, tidak jarang bahwa fakta meleset dari teori yang ada. Berikut yang disampaikan oleh K.H Hamid:

“Ulama itu adalah panutan, contoh serta rujukan. Jadi ya selalu tindakannya disorot di perhatikan. Tidak ada ulama yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak ada mba, walaupun ada ini perlu dipertanyakan. Seorang ulama punya istihadnya sendiri tidak ada yang grusa-grusu, ulama masuk ikut andil dalam politik pasti ada maksud.

Untuk apa, ya untuk kepentingan bersama. Harapannya kan begitu, menjadi mudah jalan dakwah gitu.”(wawancara,08 januari 2021)

Posisi seorang ulama ini memang tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum, namun hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat berbangsa dan bernegara itu sama. Dengan porsinya, ulama berhak untuk melakukan apa yang dikehendaki baik itu dalam ranah sosial bahkan politik. Hanya saja ulama sendiri perlu untuk lebih berhati-hati dalam melangkah maupun mengambil sikap, sebab mereka merupakan contoh bagi umatnya dalam berbagai hal.

Karakter kekuasaan antara ulama dengan politik dalam sejarah islam sudah terbentuk pada masa Rasulullah SAW ketika di Madinah, dua kekuatan tersebut yang paling menentukan dalam membentuk masyarakat, yakni agama dan politik berada dalam genggaman Rasulullah SAW ketika itu. Kekuatan yang berasal dari agama menentukan karena agama menjadi sumber penggerak serta inspirator penggerak bagi semua aspek perjuangannya, sedangkan politik sendiri melengkapi kekuatan Rasulullah SAW untuk mengatur masyarakat yang disampaikan Allah SWT melalui wahyuNya.³³

Ulama atau tokoh agama cukup beragam dalam menjalankan misi menyebarkan agama, setiap ulama dikatakan memiliki ciri khasnya sendiri dalam menjalankan dakwahnya. Tak urung juga dalam hal berpolitik ada saja ulama yang memilih untuk menghindar atau menjaga jarak dengan dunia politik-kekuasaan. Ulama yang lebih fokus atau sepenuhnya mendedikasikan diri dalam urusan agama, mengurus umat dll. Tidak bisa dipungkiri ulama yang seperti itu sudah sangat langka, menghindar atau menjaga jarak dari dunia politik bukan berarti tidak berpolitik sama sekali. Mereka berpolitik dengan mekanisme dan caranya sendiri berbeda dengan sebutan “ulama politik” mereka yang terang-terangan terjun dalam dunia politik praktis. Sumanto al Qutuby (2017) dalam opininya mengatakan dalam sejarahnya terdapat banyak macamnya “politik ulama” dimana ada yang pro ada pula yang anti politik-kekuasaan bahkan ada pula yang berada ditengah atau disebut “akomodatif-kritis” akomodatif tetapi tetap kritis terhadap pemerintah.

Membahas terkait relasi ulama dengan penguasa, melihat dari kaca mata sejarah islam dan Indonesia hubungan ulama dengan penguasa itu terjadi pasang surut, sulit untuk menjadi satu garis lurus yang pasti. Terlebih sejak dahulu pun para ulama dalam

³³ Didin Saefuddin B.,. *“Sejarah Politik Islam”*. (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009)

menyalurkan aspirasinya terhadap perpolitikan sudah terbelah. Sebagian dari mereka pro terhadap politik tertentu sebagian lain terhadap politik lainnya. Siapapun yang menjadi pilihan dan menjadi pemimpin, pasti harapan masyarakat tetap satu yakni memiliki pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, kebijakan yang baik serta mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Relasi ulama dengan penguasa, ulama-ulama NU tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang sangat dekat atau bahkan jauh dengan penguasa. Namun, keduanya hidup berdampingan hubungan antara ulama dengan penguasa ialah sangat dinamis. Pada dasarnya ketika ulama dekat dengan penguasa ialah dengan tujuan agar ajaran agama yang baik diterapkan dalam kepemimpinan penguasa tersebut agar ajaran agama tersebut dapat dijalankan selurus-lurusnya oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu 'Athailah dalam kitab *Lathaiful Minan* bahwa “pada setiap zaman pasti akan ada ulama waliyullah yang akan dimuliakan oleh penguasa di zamannya”. Beliau juga menamahkan bahwa ketika melihat kedekatan antara ulama dengan penguasa maka jangan lihat secara dhahirnya/tampak mata tetapi bagaimana sikap ulama yang ia dekat dengan penguasa untuk kepentingan umat banyak, untuk mengikis kesulitan umat, menjadi ulur tangan penghubung bagi mereka serta tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka hal tersebut tidak menjadikan turunya derajat seorang ulama yang dekat dengan penguasa.

Posisi ulama dalam islam sendiri sangatlah tinggi, seorang ulama yang memiliki kemuliaan ilmu memberikan pengaruh yang implisit dalam kedudukan struktur sosial. Kedudukan dalam struktur sosial inilah yang akan berpengaruh penting dalam pemikiran islam, sebab pengaruh ulama dalam masyarakat sangat terlihat jelas. Dari hal ini, terlihat bagaimana hubungan ulama dan penguasa itu. Ulama memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sedangkan penguasa memiliki wewenang dalam mengatur, menentukan kebijakan bagi masyarakat secara umum.

B. Relasi KHRS. Hasan Agil Ba'bud dengan Penguasa

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ulama dan politik dapat dikatakan sebagai dua hal yang saling berdampingan. Hubungan ulama dengan penguasa pun demikian saling berdampingan. Seperti dalam kaitannya dengan kebijakan dimana penguasa yang dia memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan bagi rakyatnya, sedangkan ulama hadir sebagai salah satu wakil suara dari rakyat yang memiliki otoritas alamiah sebagai *agen of control* terhadap kebijakan yang

ditetapkan. Hubungan ini layaknya seperti hubungan antara politik dengan agama, keduanya merupakan dua hal berbeda namun tidak boleh dipisahkan.

Dalam dunia politik khususnya di Indonesia ulama tidak lagi hanya menjadi seorang yang ahli dalam bidang agama saja tetapi juga menjadi ikon sebagai sosok yang memiliki pengikut yang mana segala tindak perilaku ulama menjadi panutan. Ulama dipandang masyarakat menjadi figur dalam berperilaku kehidupan sehari-hari, selain itu ulama bahkan dipandang sebagai tangan Tuhan yang memiliki kewibawaan serta karisma sehingga menjadikan setiap perilakunya serba benar dan harus di ikuti. Inilah yang menjadikan ulama memiliki daya tarik sendiri sehingga para politisi membidik para ulama. Dengan demikian, ketika dapat merangkul ulama dalam kontestasi pilkada harapan untuk meraih kemenangan semakin besar.

KHRS. Hasan agil Ba'bud merupakan ulama penting yang merupakan demisioner rais syuriah PCNU Purworejo beliau memiliki koneksi orang-orang Nu yang luas, tidak hanya bagi warga nadliyin tetapi juga masyarakat secara umum kiprah beliau sebagai ulama besar sangat diakui. Dari beberapa wawancara dengan narasumber dan beliau sendiri, Wan Hasan memang tidak bisa dikatakan sebagai tim sukses dari pasangan calon tertentu walaupun memang beliau menyampaikan pilihan terhadap pasangan calon tertentu, beliau memilih sebagai bentuk dari partisipasi sebagai warga Negara. Namun begitu, beliau tidak menampik adanya hubungan ulama dalam proses demokrasi ini. Ulama pun dalam keterlibatannya dalam politik pasti memiliki kriteria ada yang merasa tidak perlu menyampaikan pilihannya pada pasangan calon tertentu atau netral, menjadi supporter, dan ada yang menjadi pemberi do'a restu pada semua pasangan calon. Walaupun demikian, memang tidak dikatakan bahwa 100% masyarakat akan memilih pilihan yang dikehendaki oleh ulama tertentu, tetapi pandangan atau kecenderungan ulama terhadap pasangan calon tertentu bisa menjadi rujukan atau referensi masyarakat dalam memilih terlebih mereka yang merupakan pengikut setia dan santri.

Ulama pada hakikatnya akan sangat menjaga hubungan terhadap siapapun tanpa terkecuali, terlebih dalam hal ini pada para politisi. Ulama sangat populer dalam kalangan para politisi, sehingga bukan sesuatu yang baru ketika kedekatan ulama dengan politisi terlihat. Kedekatan ini merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat, artinya ulama tidak pilah pilih dalam menerima siapapun yang datang / *sowan* ke rumah ulama tersebut. Ketika terdapat sebuah kedekatan antara ulama dan juga politisi ini menjadikan wadah untuk saling mengenal dan ulama pun dapat menilai bagaimana karakter calon-calon pemimpin daerahnya sebagai landasan dalam menentukan pilihan, tidak hanya itu ulama

pun dapat memberikan arahan serta nasihat-nasihat yang membangun bagi para politisi. Berikut wawancara dengan beliau Wan Hasan:

“Calon bupati dan wakil bupati itu ya menyampaikan mau ini itu memperbaiki ini dan itu, saya sampaikan apresiasi dan menghormati niatnya. Kyai yo ndongakke to mengarahkan supaya bisa amanah ketika nanti kok dapat kesempatan menjadi bupati. Pada intinya apa, ya untuk kebaikan bersama masyarakat purworejo. Sudah tak katakan tiga pasangan calon semua itu baik, saya dan mereka ya biasa akrab ngobrol. Mereka semua baik tapi ya itu pasti tetap ada yang terbaik dari yang baik untuk Purworejo nantinya lebih sejahtera dan bisa membawa kea rah yang jauh lebih baik bersama kan ngono. Saiki werno-werno modele carane, sing penting kan nantinya itu to bisa jadi pemimpin seng amanah kyai melu bareng-bareng bisa mewujudkan itu semua (kemajuan & kesejahteraan untuk Purworejo)..” (wawancara, 12 Februari 2021)

Adapun kedekatan antara KHRS. Hasan Agil Ba’bud dengan penguasa:

Personalitas seorang ulama yang mana penulis katakan memiliki modal sosial yang cukup besar. Ulama dianggap sebagai elit agama yang memiliki basis masa yang banyak, ulama memiliki pesantren (tempat belajar ilmu agama) dengan jumlah santri yang bahkan mencapai ribuan, sekolah-sekolah formal dengan yayasan pesantren, dan juga jamaah/pengikut ulama yang memiliki kesetiaan untuk selalu nderek kyainya. Wan Hasan pun demikian, beliau merupakan pemimpin pondok pesantren yang jumlah santrinya cukup banyak serta terdapat sekolah formal dan perguruan tinggi Mahad Ali. Selain karena memang sebagai elit agama modal inilah yang menjadikan ulama memiliki daya Tarik tersendiri bagi para politisi maupun penguasa untuk menjalin kedekatan dengan ulama.

1. Masa Pilkada

Pada masa Pilkada tentunya bukan suatu hal yang baru ketika para politisi silih berganti berdatangan ke rumah ulama/kyai. Hal ini sangat wajar, selain sebagai kunjungan kepada tokoh agama juga kedatangan para politisi ini untuk

memperkenalkan diri serta meminta dukungan dan do'a restu. Kedekatan antara Wan Hasan dengan penguasa secara umum memang terlihat seperti hubungan antara seorang guru dengan muridnya, pasalnya para politisi dan juga orang-orang partai serta tim sukses pada masa Pilkada silih berganti mendatangi *ndalem* (rumah) beliau menyampaikan maksud meminta do'a restu dan meminta dukungan. Modal sosial yang penulis katakan di atas menjadi salah satu factor ulama masuk dalam agenda para politisi, ketika ulama memberikan dukungan secara langsung akan memberikan sumbangan suara bagi para politisi tentunya. Wan Hasan sendiri yang mana memiliki pilihan terhadap salah satu pasangan calon pun bukan tanpa alasan, selain karena di rasa pasangan calon 02 Kuswanto-Kusnomo ini yang paling baik, serta beliau menyampaikan siapa nanti yang memiliki potensi untuk memudahkan dakwah para ulama serta mau mendukung jalannya organisasi-organisasi agama baik NU atau pun Muhamaddiyah menurut Wan Hasan kiranya perlu untuk mendapatkan dukungan. Sebab, ketika hanya memilih pemimpin yang memajukan suatu daerah tanpa di imbangi pemimpin yang mencintai ulama serta peduli terhadap organisasi-organisasi keagamaan justru akan memberikan dampak yang tidak baik pada perkembangan agama serta menjadi tidak seimbang.

Wan Hasan dikatakan sebagai salah satu ulama yang memiliki keterbukaan dengan para penguasa maupun politik. Beliau tidak merasa harus membatasi hubungan dengan para penguasa sebab ini menjadi salah satu jalan dakwah dimana ulama dapat menjadi pengingat ketika penguasa menyimpang dari tujuan utama menjadi pemimpin. Seperti yang pernah penulis tanyakan kepada beliau Wan Hasan terkait keterlibatan sebuah organisasi keagamaan yang memiliki keberpihakan politik dan beliau menjawab dengan tegas tidak menjadi masalah asalkan nantinya siap untuk mengawal organisasi tersebut untuk mengembangkan agama.

Pada masa Pilkada antara Wan Hasan dengan pasangan calon 02 Kuswanto-Kusnomo pun memiliki kedekatan yang lebih dari pasangana lainnya, sebab beliau Wan Hasan terlihat menghadiri salah satu rangkaian dalam proses kontestasi Pilkada yaitu hadir dalam acara do'a bersama pada waktu penyerahan berkas pencalonan ke KPU.

2. Pasca Pilkada

Membahas terkait bagaimana hubungan ulama dengan penguasa/politisi pada pasca Pilkada mungkin hanya dapat sebatas melihat pasca Pilkada beberapa bulan setelah pemilihan berlangsung. Hakikatnya tidak ada kunjungan atau pertemuan secara khusus antara Wan Hasan dengan penguasa, namun seperti yang telah penulis katakan bahwa pada dasarnya Wan Hasan dengan para penguasa atau pun politisi memiliki kedekatan dalam artian tidak ada jarak anatar keduanya. Dan pada pemenangan paslon yang dimenangkan oleh pasangan 03 pun beliau juga ikut menyambut dengan baik. Wan Hasan pun menambahkan bahwa siapapun pemimpin yang jadi, beliau akan tetap mengikuti serta menghormati kepemimpinannya sekalipun bukan dari pasangan calon yang beliau beri dukungan.

Wan Hasan memang tidak memiliki tekad untuk terjun secara langsung dalam politik praktis. Namun beliau juga tetap menjalin hubungan yang baik dengan para penguasa/politisi. Beliau lebih pada ingin memastikan, mengontrol keadaan tanpa menjadi tim sukses langsung pasangan calon tertentu. Wan Hasan menegaskan bahwa yang harus dilakukan ulama yaitu bisa memahami dan tahu akan kajian politik agar nantinya tidak disalah gunakan serta tidak diberdaya oleh permainan politik yang saat ini sangat kompleks. Sebagai ulama perlu untuk berfikir secara terbuka terhadap berbagai masalah sosial tidak terkecuali politik, sebab mau bagaimana pun ulama masih menjadi orang kepercayaan masyarakat yang mana setiap hal yang ada dalam diri ulama merupakan teladan serta menjadi rujukan bagi mereka. Berikut wawancara dengan beliau:

“Ulama yo kudu paham, kudu ngerti bagaimana permainan politik. Lah nek ga ngerti malah bisa dipermainkan to. Politik itu siasat nek jerone yo ada strategi lah ini yang harus di ketahui, ulama jadi figur nang ngarep kudu siap segala ancaman. Zaman yo soyo maju, masalah itu semakin beragam kita harus bisa membaca zaman. Jangan sampai malah kita yang ditakhlukan oleh zaman. Meneh wong nang ngarep kui kudu wani kudu ngerti iso dijaluki tulung bisa mengatasi masalah yang terjadi lah nek

ra ngerti inti masalahe malah repot. Sak orane bisa membaca kondisi sekitar yang terjadi.”(wawancara,12 February 2021)

Fenomena terkait kedekatan ulama dengan politik pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat wajar. Namun, terkadang masih menjadi keberagaman pendapat masyarakat dalam menilai kedekatan antara ulama dengan politisi. Namun, penulis menganggap bahwa adanya kedekatan ulama dengan penguasa merupakan sesuai yang boleh saja terjalin dari keduanya, terutama ulama dapat menjadi jempatan dari suara rakyat dalam artian ulama bisa menjadi benteng serta pengingat untuk penguasa agar tetap bisa menjadi pemimpin yang semestinya. Ulama yang sangat diakui sebagai sosok pengayom masyarakat, penegak moral, dan merupakan *problem solver* dalam urusan agama maupun masyarakat. sehingga dengan berbagai daya Tarik yang dimiliki oleh ulama menjadi nilai penting untuk sebuah kontestasi politik untuk menarik simpati masa, sebab kepercayaan masyarakat terhadap seorang ulama masih sangat besar dan kuat. Dengan pengetahuan yang memadai terhadap politik, harapannya ulama yang terlibat dalam ranah politik dapat membawa kedamaian serta demokrasi yang baik.

Wan Hasan sendiri seperti yang telah dikatakan bahwa beliau tidak terjun dalam ranah politik secara langsung, tetapi beliau menghormati siapa pun yang akan menjadi pemimpin di Purworejo. Beliau juga menyampaikan bahwa akan sangat mendukung terhadap apapun program atau kebijakan yang direncanakan asalkan hal tersebut memberikan dampak serta manfaat terhadap kepentingan masyarakat. meskipun tidak secara langsung terjun dalam politik, ulama akan selalu hadir ditengah-tengahnya sebagai ulur tangan dari masyarakat secara umum dalam memberikan kepercayaannya kepada pemimpin untuk mengemban amanah. Berikut wawancara dengan Bapak Umar:

“Kami memang sowan ke para kyai untuk minta do’a meminta restu juga dukungan. macam-macam lah dukungan yang diberikan ada yang menyampaikan secara terbuka begitu ada yang men do’akan tanpa menyampaikan beliau mendukung siapa, kita ya mendekatlah sama para ulama bagaimanapun nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk masyarakat sendiri”.
(wawancara, 20 Januari 2021)

Ulama memang menjadi tambahan energy dalam sebuah kontestasi politik, seperti Pilkada ini. Dalam hal ini para politisi yang basisnya mencari dukungan kepada para ulama merupakan suatu hal yang sah dan wajar. Mereka mencari dukungan seperti itu karena untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah yang mana itulah tujuannya. Sehingga mengapa perlunya ulama untuk bisa melihat dan memahami serta ketelitiannya dalam membaca kondisi politik yang ada. Sebab dukungan yang ulama berikan kepada politisi/pasangan calon tertentu akan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat, dimana pilihan ulama menjadi referensi atau bahkan rujukan bagi mereka dalam menentukan pilihan. Ketika pilihan ulama itu benar dan tepat maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir masyarakat itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah di sampaikan diatas mulai dari latar belakang masalah, pertanyaan masalah, teori, dan pembahasan serta informasi-informasi yang diperoleh berdasarkan data dari dokumen maupun narasumber dimulai dari ulama terkait, beberapa tokoh NU, dan anggota partai yang mana terkait dengan peran ulama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) di Kabupaten Purworejo maka dapat diambil garis besarnya sebagai berikut;

Posisi strategis ulama dalam islam dan juga struktur sosial masyarakat semakin besar. Dewasa ini sudah menjadi hal yang sangat wajar ketika ulama yang cenderung sebagai orang yang ahli dalam bidang keagamaan semakin merambah kedalam persoalan yang lebih kompleks baik sosial, ekonomi bahkan politik menyelaraskan terkait pandangan dari Clifford Geertz yang mana ulama salah satunya sebagai *agen of control* dan *problem solver* sehingga ketika dikaitkan dapat dikatakan memang benar adanya ulama demikian. Bahkan melalui organisasi besar keagamaan Nahdlatul Ulama yang diketahui memang memiliki sejarah tersendiri dalam bidang politik menjadikan ulama-ulama didalamnya sedikit banyaknya menjadi perhatian bagi para politisi maupun penguasa, sebab masa dan loyalitas warga *nahdliyin* tidak dapat disepelakan. Ulama-ulama karismatik NU mendapatkan sorotan tersendiri bagi para politisi yang mana mencoba mendekati diri pada ulama agar dapat menarik simpati masyarakat secara umum. Hal ini terjadi karena memang sejatinya pesona yang penuh dengan karismatik seorang ulama membuatnya dipandang sebagai sosok yang nmengayomi dapat dimintai pandangan terkait beberapa persoalan.

Pada dasarnya hubungan antara politik dengan ulama merupakan sebuah kajian yang menarik dan bahkan semakin berkembang, bagaimana sebagai aktor/tokoh agama yang ia baik secara langsung maupun tidak masuk dalam sebuah ranah politik praktis. Peranan atau pun keterlibatan seorang ulama dalam politik seperti ini menurut pribadi penulis merupakan sesuatu yan wajar dan sah saja dilakukan oleh seorang ulama, dengan harapan hal ini juga membawa dampak baik kepada masyarakat pada umumnya atau pun setidaknya tidak membawa dampak buruk terhadap masyarakat. Sebab, perilaku sikap seorang ulama menjadi rujukan dan referensi utama bagi masyarakat khususnya warga

nahdliyin yang mana mereka lebih kepada slogan “nderek kyai” sehingga menjadi sangat penting segala ucapan sikap yang keluar dari diri ulama dalam menyikapi politik menjadi acuan bagi masyarakatnya.

Keterlibatan ulama pun terjadi pada Pilkada Langsung 2020 di Kabupaten Purworejo. Ulama yang dimaksud oleh penulis ialah beliau KHRS. Hasan Agil yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Imam Bulus dan merupakan tokoh besar Nahdlatul Ulama Purworejo. Secara struktural Ormas NU tidak mendukung secara penuh terhadap pasangan calon tertentu, namun individu warga NU memiliki pilihannya sendiri dalam hal ini penulis mengamati terdapat dua pasangan calon yang menjadi pilihan yaitu pasangan no. urut 02 Kuswanto dan Kusmono serta pasangan no. urut 03 yaitu Agus Bastian dan Yuli. Keduanya sama kuatnya memengan suara masyarakat khususnya warga NU. Pada penelitian ini penulis memang tidak menfokuskan kemenangan pasangan calon tetapi lebih pada adanya peran ulama dalam pilkada 2020 ini.

KHRS. Hasan Agil merupakan salah satu ulama yang secara terbuka memberikan dukungan kepada pasangan calon no. urut 02 yaitu Kuswanto dan Kusnomo. Beliau bersama ulama lainnya menghadiri acara do’a bersama dalam rangka pendaftaran sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Beliau juga mengajak para banong dan rekan-rekan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut. Kendati demikian, hubungan beliau dengan pasangan calon lainnya terlampau baik. Bagaimana tidak semua pasangan calon menyempatkan untuk sowan/datang ke rumah beliau dan di sambut dengan baik. Bahkan beliau juga tidak heran ketika nantinya foto beliau sudah terpampang pada banner kampanye pasangan calon yang menuliskan mendapatkan dukungan dari beliau.

Dari beberapa fenomena yang terjadi dalam penelitian pada kesempatan kali ini penulis melihat bahwa sosok ulama menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam proses branding pasangan calon dalam kontestasi Pilkada, terlepas dari bagaimana hubungan pribadi antara ulama dengan para politisi tertentu secara umumnya apa yang terjadi dalam pilkada 2020 ini di Kabupaten Purworejo ulama secara umum masih menjadi symbol untuk mendulang suara. Adanya dukungan dari ulama menjadikan kolntestan politik semakin percaya diri dan akan lebih banyak menarik simpati masyarakat.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan pembaca, menambah wawasan pembaca terkait pembahasan tentang peran tokoh agama/ulama

dalam politik, selain itu untuk elit agama mampu memahami betul bagaimana konsekuensinya ketika memutuskan terjun kedalam dunia politik baik secara langsung maupun tidak agar bisa membawa perubahan yang semestinya. Karena sangat besar harapan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap ulama.

Untuk para elit politik, besar sekali harapan masyarakat agar nantinya ketika menjadi pemimpin dapat menjalankan amanah dengan baik, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Anas Azhar, Anang. 2010. *Pencitraan Politik Elektoral*. Yogyakarta: Atap Buku Yogyakarta.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Ramlan, Subakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Sarlito, Wikrawan Sarwono. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono, Soekamto. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar, cet 7*. Jakarta: Rajawali.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosehan Anwar dan Andi Bahrudin Malik. 2003. *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

Jurnal

- _____. Al-Tahrir. 2010. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 2.
- Amalia Qori, Hurin. 2013. *Kepemimpinan Karismatik Versus Kepemimpinan Transformasional. Banyuwangi*.
- Bertolemes, Bolong. 2018. *Etika Politik Ulama*. Millah: Jurnal Studi Agama, NTT 2018
- Cahyono, Heru. 2012. *Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, vol. 38, No. 2*.
- Fajri, Ahmad. 2014. *"Ulama & Analitis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi*. Banten: Talenta Pustaka Indonesia Perumahan Mutiara Elok.
- Hasan, Ridwan. 2013. *Peranan Dan Sikap Transforasi Politik Ulama Dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Aceh. Millah, Vol.XII, No. 2*.
- Hasnah Nasution, Nuhsei. 2017. *Ulama & Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera dalam Politik Praktis dan Community Empowerment pada abad XX. Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 2, Desember 2017(126-144)*.
- Hasanuhdin, Sansan. 2017. *Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. Jurnal Sosiologi, 22(1): 53-58*

Lampe, Ilyas. 2010. *Konsep dan Aplikasi Publik Relations Politik pada Kontestasi Politik di Era Demokrasi (Pemilihan Langsung)*. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad, Vol. 2, No, 02.

Mughis, Abdi. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 1.

Saraswati, Retno. 2014. *Reorientasi Hukum Pemilikada yang Mensejahterakan Rakyatnya*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No,2.

Skripsi

Adi Hanafi, Febri. 2019. "*Strategi Politik DPC Partai Bulan Bintang Surabaya dalam Pemilu LEGISLATIF 2019*". Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Fiklsafat, Filsafat Politik Islam. UIN Sunan Ampel: Surabaya

AM, M. (2012). *Karisma KH Muhammad Zaini Abdul Ghani Dan Peran Sosialnya (1942-2005)*. ilmu ushuludin.

Faqih Maula, Akbar. 2017. "*Keterlibatan Ulama dalam Politik (Studi Terhadap Peran Ulama dalam Kemenangan Idris-Pardi Pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015)*". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Politik. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.

Khairunnisa, Tasya. 2018. "*Ulama Karismatik dalam Pandangan Masyarakat Lambono SKEP*". Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. UIN AR-Raniry Darussalam: Banda Aceh.

Rani, Mei Nuristha. 2017. "*Strategi Pemenangan Incumbent Pada Pilkada 2017 di Kabuptyen Brebes*". Skripsi. Fakultas Ilmu Politik dan Kewarganegaraan, Politikn dan Kewarganegaraan. UNNES: Semarang.

Rezky, Andi Aulia. 2017. *Pemilukada dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas Siyhasah Syar'iyah)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alaudin: Makassar.

Sundari, Tri. 2015. *Peran Politik Kyai di Pedesaan (Studi kasus di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan. UNNES: Semarang.

Zalika, Eka. 2019. *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Pada PILGUB 2018 (studi kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Pemikiran Politik Islam. UIN Raden Intan Lampung: Lampung.

Internet

Anwar, M Khoiril & M. Afdhilah. 2016. *Peran Ulama di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan studi Keagamaan, Vol. 4 No. 1.* <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4il.1621>.

Husnan, Dinul & Mhd. Sholihin. 2017. *Ulama, Islam, dan Gerakan Sosial-Politik Islam Indonesia. Fokus: Juhrnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.2, No. 1.* <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF>. 20 Agustus 2020.

Ratcliff, D. 2001. *Analytic Induction As Qualitative Research Method Of Analysis Availble* . [Http://don.ratctiff.net/qual/analytic.html](http://don.ratctiff.net/qual/analytic.html). 15 agustus 2020.

Simamosa, Janpatar. 2011. *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokrasi. Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1.* <https://jurnal.ugm.ac.id/article/view/16200/10746>. 25 agustus 2020.

Syahri, Alfi. 2018. *Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). JIM Unsyiah, Vol. 3, No, 1-22.* www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip. 14 agustus 2020.

Lampiran:
a. Gambar



(Bersama beliau KHRS. Hasan Agil di kediaman narasumber, 12 Februari 2021)



(Bersama K. Yusuf Sholih di kediaman narasumber, 21 Januari 2021)



(Bersama K. Hamid di kediaman narasumber, 08 Januari 2021)



(Bersama K. Farid di kantor kementerian agama Purworejo, 04 Januari 2021)



(Bersama Bapak Umar di kediaman narasumber, 20 Januari 2021)

b. Draft Pertanyaan Penelitian

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai salah satu metode untuk melakukan pengkajian data. Adapun beberapa pedoman pertanyaan secara garis besar terkait penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menurut bapak/ibu kira-kira ulama itu seperti apa?
2. Apakah eksistensi ulama dalam masyarakat memang sangat penting?
3. Kira-kira sejauh mana respon masyarakat terhadap ulama?
4. Siapa saja ulama yang memang memiliki eksistensi besar di Kabupaten Purworejno ini?
5. Apakah ulama purworejo juga memiliki eksistensi dalam perpolitikan?
6. Apakah ulama purworejo secara terang-terangan terlihat adanya keberpihakan politik?
7. Sejauh mana kiranya para ulama berada pada posisinya, atau posisi netral ditengah-tengah upaya Tarik menarik dalam pengaruh politik pada pilkada?
8. Siapakah ulama yang dianggap memiliki karisma tinggi hingga dapat menarik para politisi untuk merangkul mereka?
9. Sejauh ini adakah ulama yang memiliki hubungan erat dengan para politisi?
10. Bagaimana relasi antara ulama dan politik menurut bapak/ibu?
11. Mengapa ulama kerap menjadi perhatian oleh para politisi terlebih ketika akan adanya pemilihan?

12. Seberapa efektif adanya ulama ditengah-tengah hiruk piruk politik?
13. Bagaimana respon dari masyarakat ketika terdapat ulama yang memiliki keberpihakan politik?
14. Apakah ulama relevan untuk dijadikan sebagai kekuatan politik pada Pilkada di Purworejo?
15. Bagaimana menurut bapak/ibu sikap ulama terhadap politik sesuai dengan khitahnya?
16. Selama ini dalam perpolitikan di Purworejo, sejauh mana keterlibatan ulama dalam politik?
17. Bagaimana langkah-langkah ulama yang dilakukan pada Pemilukada di Purworejo?
18. Apakah ulama secara terbuka mengikuti kampanye dengan memobilisasi umat pada Pemilukada Purworejo?
19. Apakah ada ulama yang memiliki sekolah islam termasuk pesantren untuk mendukung secara terbuka pasangan pada Pilkada Purworejo?
20. Kira-kira apa motivasi seorang ulama untuk terlibat dalam pemilukada Purworejo?
21. Apakah ada aktivitas tertentu yang dilakukan oleh ulama sebagai bentuk mendukung salah satu paslon pada pemilukada Purworejo?
22. Bagaimana hubungan ulama dan para politisi pada saat pemilukada Purworejo?
23. Bagaimana hubungan keduanya pasca pemilukada?
24. Adakah feed back dari politisi atau paslon tertentu terhadap para ulama?
25. Sejauh mana ulama menjadi factor terhadap kemenangan paslon Pemilukada Purworejo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Lailiya Tuzuhriyah
2. TTL : Purworejo, 19 April 1999
3. Alamat : Dukuh Wetan (Komplek Masjid Al-Irsyad) Rt 02 Rw 05 Desa Pituruh
Kecamatan Pituruh Kab.Purworejo.
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
7. Pendidikan
 - a. SD : SDN INTI Candisari
 - b. SMP : Mts N 2 Kebumen
 - c. SMA : MAN 1 Magelang
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. PMII Rayon Fisip 2019-2020
 - b. BPUKM QAI Fisip 2019-2020
9. No. Hp : 0895390862465
10. E-mail : lailiyatuzuhriyah@gmail.com
11. Instagram : @lailiyatuz09
12. Motto Hidup : Be Nice People.